



RENCANA INDUK & PETA JALAN

**Pemajuan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Daerah**

Kabupaten Purworejo

2024-2029

LAPORAN AKHIR



RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024-2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH	8
2.1 Gambaran Umum Daerah	8
2.1.1 Aspek Geografis.....	8
2.1.2 Aspek Kependudukan.....	11
2.1.3 Aspek Ketenagakerjaan.....	14
2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	16
2.2 Tema Prioritas: Daya Saing	20
2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Berdaya Saing	20
2.3.2 Pertanian sebagai Sektor Unggulan	23
2.3.3 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	28
2.3.4 Tata Kelola Pemerintahan	33
BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH	35
3.1 Tantangan.....	37
3.2 Peluang	39
BAB IV ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH	41
4.1 Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah	42
4.2 Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Daerah	46
4.3 Kemitraan Riset Dan Inovasi Daerah	48
4.4 Budaya Riset Dan Inovasi Di Daerah	50
4.5 Keterpaduan Riset Dan Inovasi Daerah.....	53
4.6 Penyelarasan Dengan Perkembangan Global.....	55
BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH	58
5.1 Strategi Pengembangan Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah.....	58
5.2 Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Daerah	61
5.3 Strategi Peningkatan Kemitraan Riset Dan Inovasi Daerah.....	62
5.4 Strategi Peningkatan Budaya Riset Dan Inovasi Di Daerah	65
5.5 Strategi Penguatan Keterpaduan Riset Dan Inovasi Daerah	66
5.6 Strategi Penyelarasan Riset Dan Inovasi Daerah Dengan Perkembangan Global	68

5.7	Strategi Prioritas Pengembangan Ekosistem Riset Dan Inovasi Daerah.....	69
BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH.....		74
6.1	Peta Jalan Riset Dan Inovasi Kabupaten Purworejo 2024-2029	76
6.2	Program Riset Dan Inovasi Kabupaten Purworejo 2024-2026	78
6.2.1	Klaster Riset Inovasi Pertumbuhan Ekonomi Berdaya Saing.....	78
6.2.2	Klaster Riset dan Inovasi: Pembangunan Pertanian Unggulan	83
6.2.3	Klaster Riset dan Inovasi: Daya Saing Sumber Daya Manusia	85
6.2.4	Klaster Riset dan Inovasi: Tata Kelola Pemerintahan	88
6.3	Program, Rencana Aksi, Dan Target Riset Dan Inovasi Kabupaten Purworejo Tahun 2024-2029	90
REFERENSI.....		96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran IPTEK atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas Pembangunan daerah (Pasal 26 Ayat (1) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah). Rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK di daerah ini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dokumen ini berkedudukan dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di tingkat kabupaten/kota, dokumen ini disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perangkat daerah sejenis yang bertanggungjawab atas riset dan inovasi di daerah. Dalam rangka penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK di daerah, BRIDA melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.

Rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK di daerah disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD atau RPD untuk dipercepat capaian target programnya. Rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK di daerah provinsi. Rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK di daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD atau RPD. Rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK di daerah bertujuan untuk menjadi landasan kebijakan berbasis bukti sehingga implementasi kebijakan lebih efektif dan akseleratif dalam menangani masalah prioritas di daerah. Hasil Riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah tersebut meliputi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam rancangan teknokratik

RPJMD. Rancangan teknokratik RPJMD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode dan kerangka berpikir ilmiah didasarkan pada hasil Riset dan Inovasi

Rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK ini diharapkan mampu menyelaraskan kerja perangkat daerah dan mempercepat hasil pembangunan daerah. Terlebih, perkembangan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menguatkan peran pemerintah daerah yang bersifat sangat dekat dan memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di tingkat daerah harus dirancang, diterapkan, dan dinilai dengan cermat agar dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi penduduk setempat. Suksesnya upaya pembangunan ekonomi oleh pemerintah daerah sangat bergantung pada perencanaan yang didasarkan pada penelitian dan inovasi. Dalam konteks ini, perencanaan tersebut akan menjadi lebih terarah, efisien, dan efektif dalam penggunaan alokasi anggaran yang tersedia. Sebagai contoh, pengentasan kemiskinan yang terdorong oleh penelitian mengenai faktor-faktor penentu, memungkinkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tidak hanya mengandalkan bantuan tunai langsung, tetapi juga mencakup langkah-langkah seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan vokasional, mendorong kewirausahaan, mendukung aspek-aspek sosial dan budaya, serta intervensi dalam pemenuhan kebutuhan pangan lokal masyarakat, dan berbagai instrumen kebijakan publik lainnya. Dengan riset dan inovasi sebagai landasan perencanaan dan kebijakan, hal ini dapat menjadi pendorong utama dalam mempercepat pembangunan ekonomi di tingkat daerah.

Riset sebagai landasan untuk kemajuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Riset memiliki peranan penting dalam menghasilkan inovasi yang mampu meningkatkan aspek kehidupan di masyarakat. Terciptanya keberhasilan sebuah riset dengan pengembangan kebijakan publik berupa riset dasar (R&D), riset terapan (teknologi), dan riset pengembangan (produk). Oleh karena itu, riset sebagai kebijakan yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan dan kebijakan publik. Hal ini dilakukan untuk menciptakan dampak positif seperti kesejahteraan umum dan memajukan peradaban dengan kualitas sumber daya manusia. Fungsi riset dan inovasi di daerah mencakup berbagai kegiatan seperti penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan BRIN nomor 5 tahun 2023. Dalam konteks

ini, penelitian memiliki tujuan utama, yaitu: (1) meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (2) meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah; (3) memberdayakan masyarakat dan mengaktifkan partisipasinya; (4) meningkatkan daya saing daerah; dan (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara pengembangan bertujuan untuk melanjutkan langkah-langkah yang diambil dari hasil penelitian tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban. Lebih lanjut, pengkajian merupakan proses analisis dan perencanaan yang mencakup beberapa tahapan, seperti: (1) pengujian; (2) pengembangan teknologi; (3) perancangan dan pembangunan; serta (4) operasionalisasi. Terakhir, program penerapan mencakup kegiatan seperti: (1) transfer teknologi; (2) intermediasi teknologi; (3) penyebaran pengetahuan ilmiah dan teknologi; serta (4) komersialisasi teknologi.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai lembaga riset dalam membangun pondasi dasar ilmiah untuk mempresentasikan sebuah kebijakan publik. Riset dan inovasi menjadikan dasar pertimbangan dalam menyusun dan mengaplikasikan kebijakan publik karena sebagai salah satu tujuan pemerintah daerah. Rencana Induk dan peta pemajuan IPTEK bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan riset dan inovasi di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 dan Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024 yang merupakan langkah konkret pemerintah Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi riset dan inovasi, serta sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kemandirian berbagai bidang.

Di Kabupaten Purworejo, riset dan inovasi menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 sebagai visi tercapainya tujuan dan ketersediaan anggaran dalam penetapan program riset dan inovasi. Riset dan inovasi dengan pembuatan rencana induk dan peta jalan kemajuan IPTEK bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan riset dan inovasi di Kabupaten Purworejo. Rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK di daerah Kabupaten Purworejo bertujuan menyelaraskan rencana kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo bersama perangkat daerah dengan dukungan riset dan inovasi. Dengan demikian, kebijakan yang diimplementasikan menjadi lebih efektif dan akseleratif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

menyediakan infrastruktur yang memadai, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk riset dan inovasi, serta memperkuat kerjasama antara lembaga riset, pemerintah, dan sektor swasta dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam riset dan inovasi di daerah. Dengan adanya Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan IPTEK ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban sebagai tujuan pembangunan.

1.2 Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192)
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Kode Etik Peneliti di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 11) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang Prosedur Tahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 14) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneiti;
 - 15) Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
 - 16) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2020 Nomor 7);
 - 17) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025;
 - 18) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan IPTEK Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2030. Tujuan tersebut agar terciptanya keterpaduan, keberlanjutan dan tepat sasaran dalam memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. Berikut rincian tujuan dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan IPTEK

- 1) Menjelaskan gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi di Kabupaten Purworejo.
- 2) Menetapkan dan menjelaskan tema prioritas riset dan inovasi di daerah Kabupaten Purworejo.
- 3) Menetapkan dan menjelaskan tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah Kabupaten Purworejo.
- 4) Menetapkan dan menjelaskan kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di daerah Kabupaten Purworejo.
- 5) Menetapkan dan menjelaskan strategi riset dan inovasi di daerah Kabupaten Purworejo.
- 6) Menetapkan dan menjelaskan peta jalan program kegiatan prioritas riset dan inovasi daerah Kabupaten Purworejo yang relevan, terpadu, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK di daerah paling sedikit memuat (Pasal 28 Ayat (1) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah):

- 1) gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah;
- 2) gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah;
- 3) permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya;
- 4) tema prioritas Riset dan Inovasi di daerah;
- 5) tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di daerah;
- 6) analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
- 7) strategi Riset dan Inovasi di daerah; dan
- 8) peta jalan Riset dan Inovasi di daerah.

Berdasarkan peraturan BRIN sebagaimana muatan isi minimum rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK daerah, maka dokumen ini memiliki struktur penulisan sebagai berikut (sesuai lampiran II Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah):

1) **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

2) **BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH**

Bab II memuat gambaran umum wilayah, kondisi riset dan inovasi, dan tema prioritas di Kabupaten Purworejo.

3) **BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH**

Bab III memuat tantangan dan peluang pelaksanaan riset dan inovasi di daerah Kabupaten Purworejo.

4) **BAB IV ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH**

Bab IV memuat analisis kesenjangan ekosistem riset dan inovasi di daerah yang terdiri dari 6 elemen ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Purworejo.

5) **BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH**

Bab V memuat strategi penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah Kabupaten Purworejo sesuai analisis kesenjangan dalam 6 elemen ekosistem riset dan inovasi di daerah.

6) **BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH**

Bab VI memuat peta jalan riset dan inovasi di daerah Kabupaten Purworejo dalam periode 2024-2029 yang mencakup seluruh perangkat daerah.

7) **BAB VII PENUTUP**

Bab VII memuat kesimpulan, saran, dan tindak lanjut akademis.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografis

Wilayah Kabupaten Purworejo merupakan penghubung antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah bagian Selatan. Kabupaten Purworejo memiliki luas 1.034,82 km² dengan 16 Kecamatan yang terbagi menjadi 494 desa dan kelurahan. Kecamatan paling luas di Kabupaten Purworejo adalah Kecamatan Bruno dengan luas 108,43 km², sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kutoarjo dengan luas 37,59 km².

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Km2)
1	Grabag	32	64,92
2	Ngombol	57	55,27
3	Purwodadi	40	53,96
4	Bagelen	12	63,76
5	Kaligesing	21	74,73
6	Purworejo	25	52,72
7	Banyuurip	27	45,08
8	Bayan	26	43,21
9	Kutoarjo	27	37,29
10	Butuh	41	46,08
11	Pituruh	49	77,42
12	Kemiri	40	92,05
13	Bruno	18	108,43
14	Gebang	25	71,86
15	Loano	21	55,65
16	Bener	28	94,08
		494	1034,82

Sumber : BPS Kabupaten Purworejo (2023)

Keadaan iklim di Kabupaten Purworejo mempunyai iklim tropis basah dengan suhu antara 19° C sampai dengan 29° C, sed angka kelembaban udara Kabupaten Purworejo antara 70% sampai dengan 90%. Wilayah Kabupaten Purworejo memiliki topografi yang bervariasi mulai dari daerah curam hingga datar. Dataran rendah di Kabupaten Purworejo berkisaran 0-25 mdpl dan dataran tinggi 25-1.00 mdpl. Hal tersebut wilayah Purworejo memiliki beberapa pegunungan dari Gunung Pupur hingga Gunung Ayamayam. Data curah hujan bulanan dan jumlah hari hujan selama satu tahun memberikan gambaran yang komprehensif tentang pola hujan selama periode tersebut. Januari mencatat curah hujan tertinggi dengan 15.502 mm, menandakan awal tahun yang basah dan jumlah hari hujan sebanyak 597 hari. Februari juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi, yakni 12.836 mm, dengan 492 hari hujan. Maret menunjukkan penurunan yang signifikan dengan 6.665 mm curah hujan dan 396 hari hujan. Bulan Mei mencatat curah hujan terendah hanya sebesar 195 mm, yang sejalan dengan jumlah hari hujan yang sangat rendah, yaitu hanya 19 hari. Bulan-bulan dengan curah hujan yang cukup tinggi termasuk November dengan 13.714 mm dan Juli dengan 665 mm, meskipun jumlah hari hujan pada Juli lebih rendah dibandingkan bulan-bulan lainnya.

Analisis data pada tabel 2.2 menggambarkan variasi yang signifikan dalam pola curah hujan dan jumlah hari hujan selama satu tahun di Kabupaten Purworejo. Informasi ini penting untuk pemahaman iklim lokal, perencanaan pertanian, manajemen sumber daya air, dan keperluan lainnya yang terkait dengan dampak iklim bulanan. Data curah hujan bulanan dan jumlah hari hujan selama satu tahun menunjukkan variasi yang beragam. Pada bulan Januari, tercatat curah hujan tertinggi sepanjang tahun dengan jumlah mencapai 15.502 mm, disertai dengan 597 hari hujan. Fenomena ini mungkin mencerminkan awal tahun yang penuh dengan aktivitas hujan yang intens. Bulan Februari juga menunjukkan tingkat curah hujan yang tinggi, mencapai 12.836 mm, dengan 492 hari hujan. Pada bulan Maret, terjadi penurunan yang signifikan dengan 6.665 mm curah hujan dan 396 hari hujan.

Berikutnya, bulan Mei menjadi poin menarik karena mencatat curah hujan yang sangat rendah, hanya sebesar 195 mm, dan jumlah hari hujan yang minim, yaitu hanya 19 hari. Ini mengindikasikan periode kering atau musim kemarau yang mencolok. Meskipun kurang curah hujan, bulan Juni mencatat jumlah hari hujan yang lebih banyak, yaitu 242 hari, dengan curah hujan sebesar 5.178 mm. Bulan-

bulan lain dengan curah hujan yang cukup tinggi termasuk November dengan 13.714 mm dan Juli dengan 665 mm. Meskipun jumlah hari hujan pada Juli tergolong rendah, angka curah hujan yang signifikan menunjukkan bahwa bulan tersebut mungkin ditandai oleh hujan yang lebih intens dalam periode singkat. Analisis lebih mendalam tentang data ini dapat memberikan wawasan yang lebih tajam tentang pola hujan bulanan dan distribusi hari hujan. Informasi ini vital untuk perencanaan pertanian, manajemen air, dan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika iklim suatu wilayah dalam rentang waktu tertentu.

2.1.2 Aspek Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2022 tercatat sebanyak 778.257 orang. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Purworejo dengan jumlah 85.541 orang dan penduduk terendah berada di Kecamatan Kaligesing sejumlah 31.995. Laju pertumbuhan penduduk per-tahun di Kabupaten Purworejo sebanyak 0,62%. Persebaran penduduk yang berada di berbagai kecamatan Kabupaten Purworejo. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kutoarjo dengan jumlah kepadatan 1669 jiwa per km². Jenis kelamin Kabupaten Purworejo sebesar 778.257 jiwa artinya jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan Perempuan.

Tabel 2. 3 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Perubahan
		Laki-laki	Perempuan		
1	2019	352.767	362.049	714.816	1.055
2	2020	385.266	384.614	769.880	55.064
3	2021	387.047	386.541	773.588	3.708
4	2022	402.939	401.396	804.335	30.747

Sumber : Kabupaten Purworejo Dalam Angka (2023)

Tabel tersebut memberikan gambaran perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2019, total penduduk mencapai 714.816, dengan laki-laki sebanyak 352.767 dan perempuan 362.049. Terdapat peningkatan sebanyak 1.055 penduduk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan yang lebih signifikan,

dengan total penduduk mencapai 769.880 dan penambahan sebesar 55.064 orang. Pada tahun 2021, pertumbuhan melambat dengan total penduduk mencapai 773.588 dan penambahan sebesar 3.708. Sementara itu, pada tahun 2022, pertumbuhan kembali terjadi, dan total penduduk mencapai 804.335, dengan penambahan sebesar 30.747 orang. Data ini mencerminkan dinamika populasi dan perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan selama periode empat tahun terakhir, dengan tren pertumbuhan yang bervariasi dari tahun ke tahun.

Tabel tersebut juga memberikan gambaran yang relatif rinci tentang perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, populasi keseluruhan mencapai 714.816, dengan laki-laki menyumbang 352.767 dan perempuan 362.049. Terdapat penambahan sebesar 1.055 orang dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil pada periode tersebut. Tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan yang lebih signifikan, dengan total penduduk meningkat menjadi 769.880, dan pertambahan sebesar 55.064 orang. Pertumbuhan yang relatif besar ini dapat mencerminkan faktor-faktor seperti kelahiran yang tinggi atau mungkin faktor migrasi yang signifikan. Pada tahun 2021, terlihat penurunan dalam tingkat pertumbuhan, namun populasi terus meningkat menjadi 773.588. Penambahan sebanyak 3.708 orang mencerminkan pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun 2022 menunjukkan peningkatan kembali dalam tingkat pertumbuhan, dengan total penduduk mencapai 804.335 dan penambahan sebesar 30.747 orang. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti peningkatan kelahiran, penurunan tingkat kematian, atau migrasi yang signifikan. Secara keseluruhan, analisis tahunan memberikan pandangan mendalam tentang dinamika pertumbuhan populasi, mengidentifikasi tahun-tahun dengan pertumbuhan yang lebih cepat atau lebih lambat, dan memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mungkin memengaruhi perubahan ini.

Tabel 2. 4 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk/Km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Grabag	64,92	49.727	765	100
2	Ngombol	55,27	25.277	638	98
3	Purwodadi	53,96	41.652	771	96

4	Bagelen	63,76	30.541	478	98
5	Kaligesing	74,73	31.955	427	101
6	Purworejo	52,72	85.541	1.622	97
7	Banyuurip	45,08	43.464	964	96
8	Bayan	43,21	51.923	1.202	98
9	Kutoarjo	37,29	59.247	1.669	98
10	Butuh	46,08	53.395	916	97
11	Pituruh	77,42	43.697	669	101
12	Kemiri	92,05	59.247	643	101
13	Bruno	108,43	53.395	492	106
14	Gebang	71,86	43.697	608	102
15	Loano	55,65	38.391	715	101
16	Bener	94,08	57.127	607	102
Jumlah		1034,82	778.257	752	100

Sumber : Kabupaten Purworejo Dalam Angka (2023)

Tabel ini menyajikan data yang sangat rinci tentang berbagai aspek demografis dan geografis seluruh kecamatan di Kabupten Purworejo. Kecamatan Bruno menonjol dengan luas wilayah terluas, mencapai 108,43 kilometer persegi, dan salah satu kepadatan penduduk terendah, yaitu 492 orang per kilometer persegi. Sedangkan, kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kaligesing 427 orang per kilometer persegi. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Bruno memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah karena memang memiliki luas wilayah yang luas. Sebaliknya, Kecamatan Kutoarjo, dengan luas wilayah terkecil, memiliki kepadatan penduduk tertinggi, mencapai 1.669 orang per kilometer persegi, menggambarkan tingkat penumpukan populasi yang signifikan di wilayah tersebut pada luasan wilayah yang relatif sempit.

Pengelolaan sumber daya dan infrastruktur di setiap kecamatan juga bergantung pada variasi yang signifikan dalam konteks kepadatan penduduk. Kecamatan Purwodadi, dengan luas wilayah yang lebih kecil daripada Kecamatan Bruno, menunjukkan kepadatan penduduk yang tinggi, menyoroti potensi tantangan dalam pengelolaan ruang dan sumber daya. Di sisi lain, Kecamatan Kaligesing dengan luas wilayah yang besar dan kepadatan penduduk yang rendah mungkin memiliki tantangan berbeda, seperti pengembangan infrastruktur dan layanan yang merata. Rasio jenis kelamin penduduk yang ditunjukkan di setiap kecamatan, data ini memberikan gambaran komprehensif tentang distribusi penduduk dan karakteristik wilayah di tingkat kecamatan. Analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi yang mendasari pola demografis ini. Dengan informasi ini, pengambilan keputusan dan

perencanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran, menciptakan dasar yang kokoh untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

2.1.3 Aspek Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan sebagai aspek kegiatan yang dilakukan Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pengangguran terbuka di Kabupaten Purworejo sebanyak 18.354 jiwa. Adapun Masyarakat bukan tenaga kerja sebanyak 157.254. Adapun data ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 5 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo

Kegiatan Utama (1)	Jenis Kelamin		Laki-Laki+
	Laki-Laki (2)	Perempuan (3)	Perempuan (4)
I. Angkatan Kerja	233.90	178.224	412.029
1. Bekerja	223.105	170.670	393.775
2. Pengangguran Terbuka	10.800	7.554	18.354
II. Bukan Angkatan Kerja	44.682	112.572	157.254
1. Sekolah	19.281	21.118	40.399
2. Mengurus Rumah Tangga	14.007	81.061	95.138
3. Lainnya	11.324	10.393	21.717
Jumlah	278.587	290.796	569.383

Dari data tersebut, diketahui masyarakat bekerja sebanyak 166.795 jiwa dengan pendidikan terakhir sekolah dasar (SD) persentase 97,48%. Sebanyak 82.289 jiwa pendidikan terakhir sekolah menengah pertama (SMP) persentase 93.32%. Selanjutnya, sebanyak 100.918 jiwa pendidikan terakhir sekolah menengah atas (SMA) dengan persentase 94.46% dan sebanyak 114.421 jiwa pendidikan terakhir yaitu perguruan tinggi dengan persentase 95,45%. Adapun data sebaran ketenagakerjaan berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan disajikan pada dibawah ini:

Tabel 2. 6 Data Ketenagakerjaan Menurut Pendidikan Terakhir

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
< SD	166.795	4.313	171.108	97,48
SMP	82.289	5.889	88.178	93.32
SMA	114.421	6.708	121.129	94.46
Perguruan Tinggi	30.270	1.444	31.714	95,45
Jumlah	393.775	18.354	412.129	99,5

Sumber: Kabupaten Purworejo dalam Angka tahun 2023

Selanjutnya, dari data ketenagakerjaan tersebut diperoleh kategori pekerjaan utama dengan jumlah terbanyak yaitu Kategori Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebanyak 99.456 jiwa. Disusul Kategori Buruh/Karyawan/Pegawai sebanyak 91.452 jiwa. Selanjutnya, Kategori Berusaha sendiri sebanyak 88.622 jiwa. Kategori Pekerja Keluarga/Tak dibayar sebanyak 64.842 jiwa. Kategori Pekerja Bebas sebanyak 36.589 jiwa. Terakhir yaitu Kategori Berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 12.814 jiwa. Adapun sebaran status pekerjaan utama disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 7 Sebaran Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha Sendiri	44.369	44.253	88.622
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	66.708	32.748	99.456
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	9.481	3.333	12.814
Buruh/Karyawan/Pegawai	53.555	37.897	91.452
Pekerja Bebas	31.848	4.741	36.589
Pekerja Keluarga/Tak dibayar	17.144	47.698	64.842
Jumlah	223.105	170.670	393.775

Sumber: Kabupaten Purworejo dalam Angka tahun 2023

2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan struktur perekonomian suatu wilayah dari tahun ke tahun, yang mana jika dilihat dari data PDRB di Kabupaten Purworejo pada tahun 2018-2022, terdapat 3 sektor terbesar pembentuk PDRB yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp 4.637.475,45. Terbesar kedua adalah Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp 4.190.372,35 dan terbesar ketiga Sektor Perdagangan Bebas sebesar Rp. 2.623.300,0. Adapun data Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2018-2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 8 Pendapatan Regional Domestik Bruto (BDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2022

Kode	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian	4.073.181,67	4.177.031,20	4.359.325,43	4.359325	4.637.475,45
B	Pertambangan dan Penggalian	134.842,34	145.604,91	152.708,54	163.153,80	172.991,45
C	Industri Pengolahan	3.286.504,84	3.541.303,45	3.645.201,72	3.881.471,33	4.190.372,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.864,01	14.602,97	14.769,33	15.368,50	16.937,69
E	Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9.741,79	10.319,85	11.945,56	12.700,68	12.700,68
F	Konstruksi	1.556.876,09	1.696.261,64	1.639.831,18	1.843.616,93	2.011.676,99
G	Perdagangan Besar	2.170.630,89	2.353.502,62	2.277.069,45	2.461.862,25	2.623.300,03
H	Transportasi dan Pergudangan	888.850,37	979.847,83	740.918,76	788.021,99	1.307.363,58
I	Akomodasi dan Makan Minum	366.054,97	400.107,01	385.483,87	412.509,72	482.067,74
J	Informasi dan Komunikasi	909.889,45	1.018.133,62	1.166.351,97	1.236.336,11	1.248.883,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	633.454,41	663.548,57	676.808,46	723.065,22	785.592,64
L	Real Estate	351.251,36	375.103,89	376.849,34	389.307,61	412.028,12
M,N	Jasa Perusahaan	54.612,03	61.572,17	58.262,61	60.349,37	65.108,62
O	Administrasi Pemerintahan,	691.663,01	727.059,22	726.511,18	710.019,38	738.177,50

Kode	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
P	Jasa Pendidikan	1.565.365,40	1.727.226,27	1.740.635,38	1.761.871,13	1.804.994,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	290.891,69	317.047,36	353.860,72	357.965,50	365.623,20
R,S,T ,U	Jasa lainnya	409.833,11	449.190,56	419.791,17	426.527,85	473.710,64
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		17.407.507,43	18.657.373,14	18.646.485,02	19.602.717,78	21.349.004,94

Sumber: Kabupaten Purworejo dalam Angka tahun 2023

Sebagaimana PDRB atas dasar harga konstan, 3 sektor terbesar PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Purworejo tahun 2022 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai Rp 4.637.475,45,-. sektor Industri pengolahan senilai Rp 4.190.372,35,-. Sektor konstruksi sebesar Rp2.623.300,03. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu daerah. Proses ini melibatkan beberapa elemen seperti penambahan jumlah industri, peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi, peningkatan jumlah fasilitas infrastruktur seperti sekolah, jalan, rumah sakit, dan fasilitas umum, serta peningkatan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga mencakup perkembangan-perkembangan lain yang turut berperan dalam mendorong kemajuan ekonomi di daerah tersebut. PDRB atas dasar harga konstan menghitung pertumbuhan ekonomi sebagai rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, yang berarti bahwa jika sebuah sektor memiliki peran yang paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, begitu juga sebaliknya.

Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan Penduduk miskin ialah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Adapun data Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin serta Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 9 Garis Kemiskinan, Jumlah, Dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Purworejo Tahun 2022

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	265.310	81,20	12,04
2015	277.092	84,74	12,54
2016	294.451	85,97	12,69
2017	306.769	83,43	12,28
2018	327.536	77,75	11,42
2019	344.994	71,91	10,54
2020	364.638	78,30	11,46
2021	380.287	81,61	11,91
2022	405.127	74,07	10,79

Garis kemiskinan di Kabupaten Purworejo tahun 2022 adalah sebesar 405.127 per kapita per bulan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin mencapai 74,07 ribu jiwa atau 10,79% dari populasi penduduk di Kabupaten Purworejo , mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Walaupun demikian, data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin masih mengalami fluktuasi. Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Indeks keparahan kemiskinan mencapai 0,37, mengalami penurunan dari tahun 2021 tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan periode 2018-2020.

Garis kemiskinan di Kabupaten Purworejo mencapai Rp 405.127/kapita /perbulan. Adapun jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebanyak 74,07 ribu jiwa atau 10,79 % populasi penduduk di Kabupaten Purworejo dimana mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Meskipun demikian, data menunjukkan persentase penduduk miskin masih fluktuatif. Demikian pula pada indeks kedalaman kemiskinan dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan mencapai 0,37 atau turun dibanding 2021 namun lebih tinggi dibanding 2018-2020.

Tabel 2. 10 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
(1)	(2)	(3)
2014	1,56	0,33
2015	1,95	0,46
2016	2,08	0,56
2017	2,65	0,78
2018	1,6	0,34
2019	1,53	0,34
2020	1,63	0,35
2021	1,65	0,38
2022	1,67	0,37

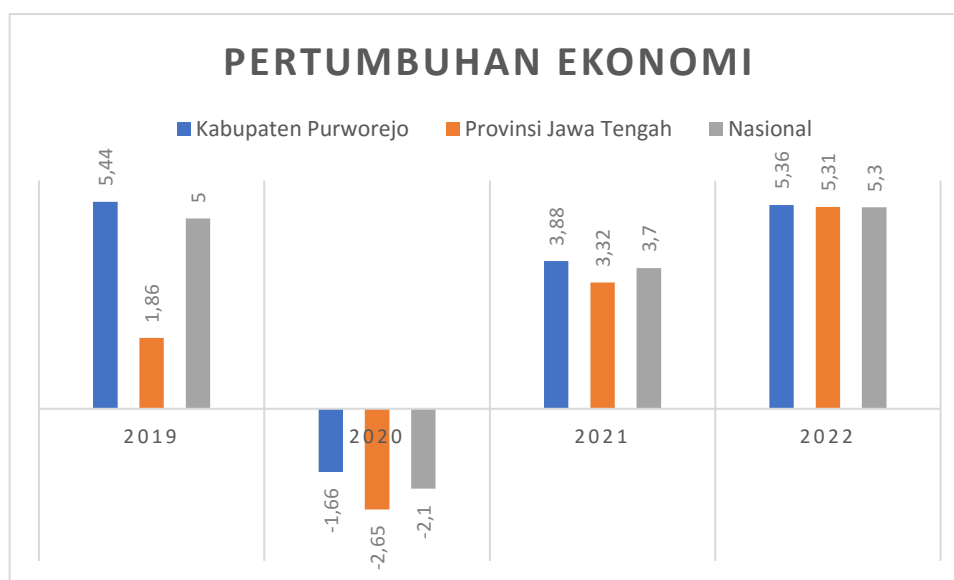
Tabel 2.10 tersebut memberikan gambaran tentang indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan selama periode 2014 hingga 2022. Indeks kedalaman kemiskinan mencerminkan posisi penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sementara indeks keparahan kemiskinan mengukur tingkat ketimpangan di antara mereka. Pada tahun 2017, terjadi lonjakan signifikan dalam indeks kedalaman (2,65) dan keparahan (0,78) kemiskinan, menandakan adanya kenaikan yang tajam dalam tingkat kemiskinan pada periode tersebut. Penurunan yang mencolok terjadi pada tahun 2018, dengan indeks kedalaman turun menjadi 1,6, mengindikasikan upaya yang berhasil dalam mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan.

Selama periode 2019 hingga 2022, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tetap relatif stabil. Pada tahun 2019, indeks kedalaman kemiskinan mencapai 1,53 dan keparahan 0,34, menunjukkan adanya kestabilan dalam tingkat kemiskinan. Meskipun terdapat kenaikan tipis pada tahun 2020 dan 2021, dengan indeks kedalaman berturut-turut sebesar 1,63 dan 1,65, serta keparahan masing-masing sebesar 0,35 dan 0,38, tetapi perubahan ini tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2022, terjadi penurunan kecil dengan indeks kedalaman 1,67 dan keparahan 0,37. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi tingkat kemiskinan selama periode waktu ini. Data ini memberikan dasar untuk pemantauan kebijakan dan perencanaan strategi guna mengatasi tantangan kemiskinan di masa mendatang, dengan fokus pada upaya-upaya yang dapat mempertahankan atau meningkatkan tren penurunan tingkat kedalaman kemiskinan.

2.2 Tema Prioritas: Daya Saing

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Berdaya Saing

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo mencerminkan kinerja ekonomi yang kuat. Hal ini terlihat dari tingkat stabilitas pertumbuhan ekonomi yang relatif baik, dengan fluktuasi yang tidak terlalu tinggi. Selain itu, selama krisis ekonomi selama pandemi pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tetap mengalami penurunan, meskipun tidak dalam tingkat yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi di Kabupaten Purworejo cukup kuat, terutama dalam menghadapi situasi krisis. Biasanya, hal ini disebabkan oleh fleksibilitas sektor ekonomi dan mobilitas tenaga kerja yang dinamis.

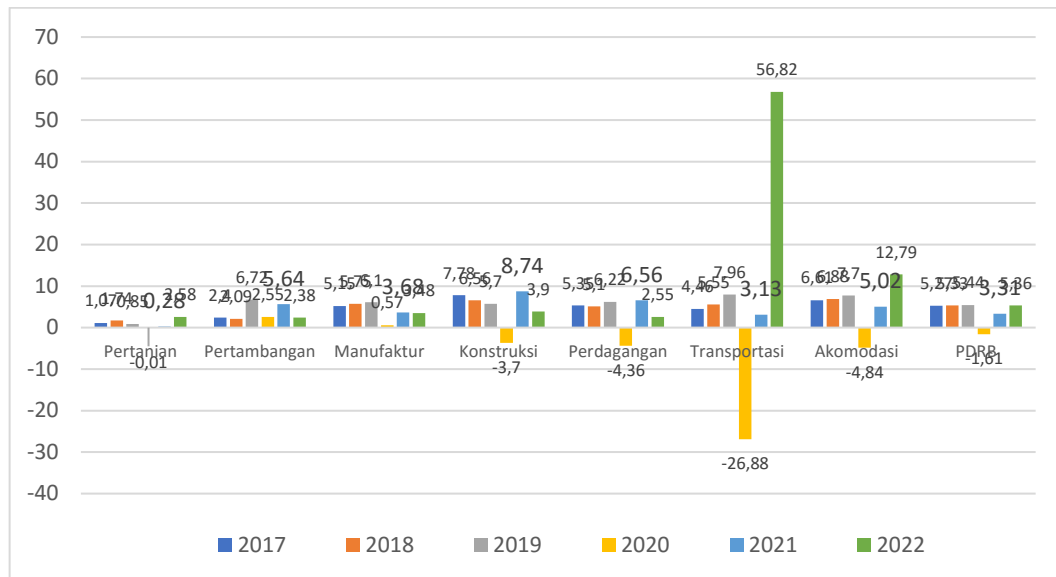


Gambar 2. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo (2023)

Struktur ekonomi Kabupaten Purworejo yang kokoh mendorong pertumbuhan ekonomi tidak mengalami percepatan yang signifikan meski diatas provinsi dan nasional. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi inklusif, adalah wajar jika terjadi trade-off antara pertumbuhan dan stabilitas. Tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo agar tidak selalu berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Tengah, seperti yang tergambar dalam grafik di atas.

Oleh karena itu, perlu dirancang konsep pembangunan sektoral yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkualitas.



Gambar 2. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor di Kabupaten Purworejo 2017-2022

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo (2023)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo selama periode 2017 hingga 2022 tercermin dalam variasi yang signifikan pada sektor pertanian. Meskipun mengalami fluktuasi, pertumbuhan sektor pertanian menunjukkan kecenderungan positif, dengan kenaikan pada tahun 2018 dan pemulihan yang kuat pada tahun 2022. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan sektor pertanian melibatkan kondisi iklim, teknologi pertanian, dan kebijakan sektoral (Khan, 2019). Sebaliknya, sektor pertambangan mengalami dinamika yang lebih kompleks, dengan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2019 diikuti oleh kontraksi pada tahun 2020. Literatur menunjukkan bahwa sektor pertambangan sering kali rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan regulasi pemerintah (Acemoglu et al., 2019).

Sektor manufaktur di Kabupaten Purworejo menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil selama periode ini, dengan kontraksi pada tahun 2020 yang diikuti oleh pemulihan pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan pada tahun 2020 dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap rantai pasokan global dan permintaan konsumen (World Bank, 2020). Sebaliknya, sektor

konstruksi mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2017 dan 2018, kemudian kontraksi yang tajam pada tahun 2020, dan pemulihan yang kuat pada tahun 2021. Literatur menunjukkan bahwa sektor konstruksi dapat sangat dipengaruhi oleh investasi infrastruktur dan regulasi pembangunan (Barlow et al., 2018).

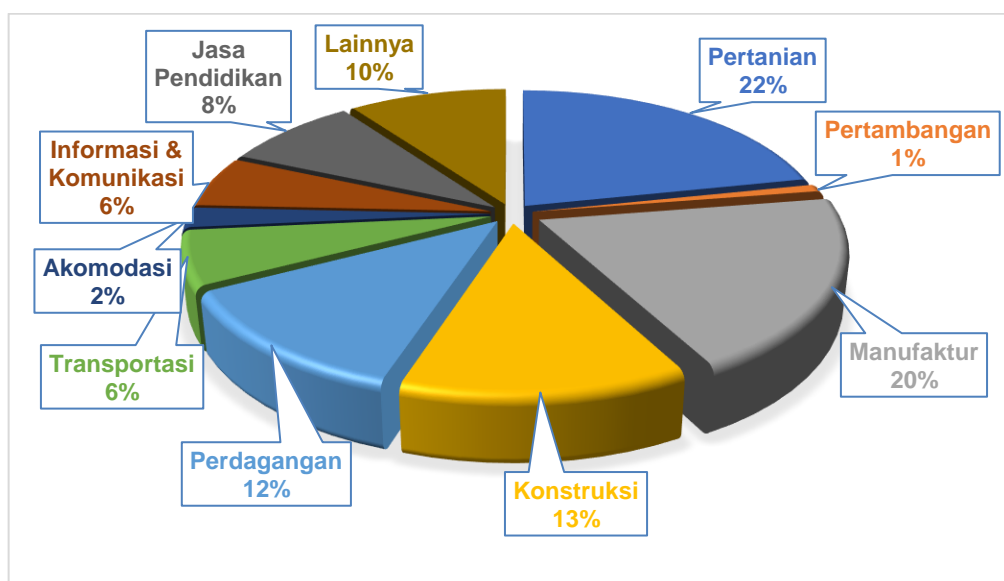
Sektor perdagangan di Kabupaten Purworejo menunjukkan fluktuasi yang dinamis, terutama dengan kontraksi yang mencolok pada tahun 2020. Faktor global seperti penurunan permintaan ekspor dan pembatasan perdagangan nasional dan internasional dapat memiliki dampak signifikan pada sektor ini (IMF, 2021). Sektor transportasi mengalami tantangan besar pada tahun 2020 dengan penurunan yang sangat besar, diikuti oleh pertumbuhan yang luar biasa pada tahun 2022. Perubahan besar ini mungkin terkait dengan perubahan pola mobilitas dan kebijakan transportasi (Gössling et al., 2021). Sementara itu, sektor akomodasi menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan signifikan setiap tahun, mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022. Pertumbuhan sektor ini dapat terkait dengan peningkatan pariwisata regional dan pengembangan infrastruktur pendukungnya (UNWTO, 2019).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purworejo menunjukkan pertumbuhan yang cenderung positif selama periode yang diamati, meskipun terjadi kontraksi pada tahun 2020. Faktor-faktor global, seperti pandemi COVID-19, dan faktor lokal, seperti kebijakan pemerintah daerah, memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi keseluruhan (World Bank, 2020; McCann, 2019). Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor ini dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Purworejo.

Data pertumbuhan ekonomi menurut sektor di Kabupaten Purworejo memberikan gambaran kompleks tentang dinamika ekonomi lokal. Penelitian mendatang dapat fokus pada identifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi pertumbuhan sektor-sektor utama ini dan merumuskan kebijakan yang lebih spesifik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengintegrasian kebijakan yang mendukung ketahanan ekonomi lokal dan respons terhadap dinamika global akan menjadi kunci dalam merancang strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Purworejo.

2.3.2 Pertanian sebagai Sektor Unggulan

Pembangunan sektor pertanian merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan kontribusi ekonomi dari kegiatan pertanian. Upaya ini melibatkan sejumlah strategi dan kebijakan yang dirancang untuk memperbaiki kondisi pertanian, mulai dari peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, hingga dukungan terhadap petani dan infrastruktur pertanian. Peningkatan teknologi pertanian mencakup penerapan inovasi seperti penggunaan benih unggul, teknik irigasi modern, dan pendekatan pertanian berbasis data. Pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah dan air, menjadi fokus untuk menjaga keberlanjutan pertanian dalam jangka panjang. Selain itu, pembangunan sektor pertanian juga melibatkan upaya untuk meningkatkan akses petani terhadap pasar, pendidikan pertanian, dan penguatan kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan. Pembangunan sektor pertanian memiliki urgensi sebagai sektor unggulan di Kabupaten Purworejo. Selain karena



Gambar 2. 4 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 2022

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo (2023)

Kontribusi sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purworejo memberikan gambaran yang mendalam tentang struktur ekonomi lokal. Pertanian dengan kontribusi sebesar 21,72%, memegang peran utama dalam mendukung ekonomi daerah. Hal ini mencerminkan pentingnya

sektor pertanian sebagai penghasil sumber daya utama dan penyokong mata pencaharian masyarakat lokal. Meskipun demikian, penting juga untuk memperhatikan bahwa sektor pertanian mungkin menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga komoditas dan ketergantungan pada faktor alam.

Di sisi lain, sektor pertambangan dengan kontribusi hanya 0,81% menunjukkan dampaknya yang terbatas terhadap PDRB. Meskipun relatif kecil, sektor ini tetap relevan dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Dalam merencanakan pembangunan ekonomi, penting untuk mempertimbangkan bagaimana memanfaatkan potensi sektor ini secara berkelanjutan. Berikutnya, sektor manufaktur, dengan kontribusi 19,63%, memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi. Keberagaman ekonomi melalui sektor manufaktur dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi.

Sektor konstruksi, perdagangan, dan transportasi memiliki kontribusi yang signifikan masing-masing sebesar 12,9%, 12,29%, dan 6,12%. Sektor-sektor ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang kuat, terutama dalam pembangunan infrastruktur, distribusi barang, dan konektivitas wilayah. Namun, fluktuasi dalam kontribusi sektor perdagangan mungkin memerlukan perhatian khusus, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi global. Sektor akomodasi, informasi & komunikasi, serta jasa pendidikan memiliki kontribusi yang beragam, menunjukkan keberagaman potensi ekonomi di Kabupaten Purworejo. Sektor pendidikan, dengan kontribusi sebesar 8,45%, menunjukkan fokus yang baik pada pengembangan sumber daya manusia, yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang.

Sementara itu, kategori "Lainnya" dengan kontribusi sebesar 9,97% menunjukkan adanya sektor-sektor yang belum terdefinisi dengan jelas. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami sektor-sektor ini dan potensi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Keseluruhan, analisis kontribusi sektor-sektor ini memberikan pandangan komprehensif tentang struktur ekonomi Kabupaten Purworejo. Merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika masing-masing sektor dan integrasi strategi yang berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten tersebut.

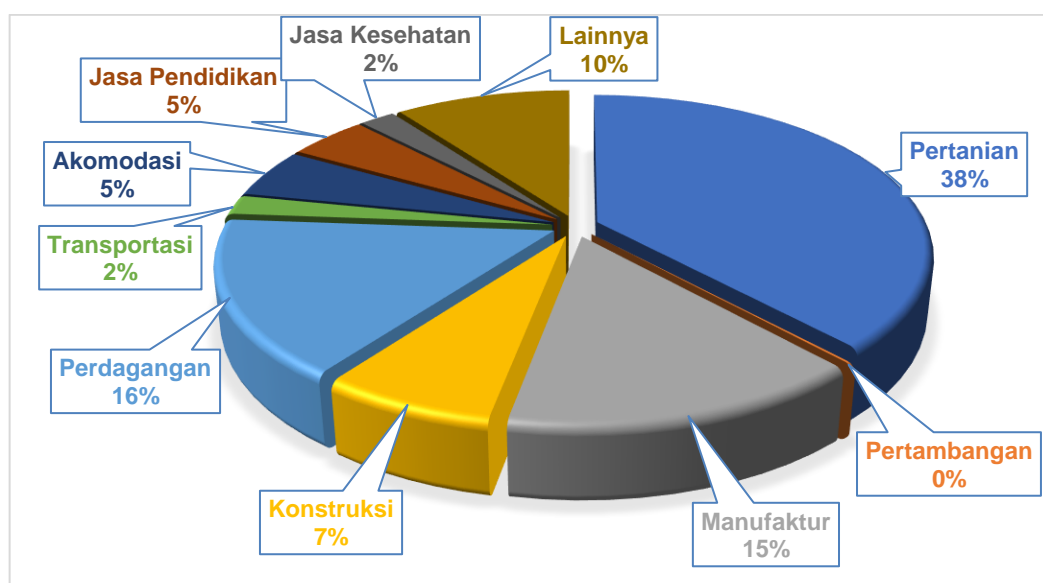
Berfokus pada sektor pertanian, kontribusi sektor pertanian sebesar 21,72% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purworejo menegaskan peran yang krusial dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pertanian bukan hanya menjadi sumber utama pendapatan, tetapi juga memainkan peran penting dalam memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Sektor pertanian, dengan kontribusi lebih dari dua per lima dari PDRB, secara signifikan menyumbang pada pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pertanian dapat mendorong aktivitas ekonomi lainnya, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Selain itu, pertumbuhan sektor ini dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Pertanian memiliki dampak langsung pada ketahanan pangan. Kontribusi yang substansial dari sektor pertanian mencerminkan potensi untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal dan bahkan mendukung pemasaran produk pertanian ke luar daerah. Ini tidak hanya mendukung keberlanjutan pangan lokal tetapi juga menciptakan peluang untuk mengembangkan rantai pasok pangan yang lebih kuat.

Peran pertanian dalam pemberdayaan petani lokal tidak dapat diabaikan. Dengan pertumbuhan sektor ini, petani dapat mendapatkan manfaat yang lebih besar dari hasil pertanian mereka, meningkatkan taraf hidup, dan mendorong inklusi ekonomi. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan juga dapat menciptakan peluang bagi petani untuk berpartisipasi dalam keputusan terkait pertanian dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Sementara pertanian sendiri memiliki dampak positif, kontribusi sektor ini juga memberikan dasar untuk mengembangkan sektor ekonomi lainnya. Keberhasilan pertanian dapat menciptakan peluang untuk diversifikasi ekonomi, seperti pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata pedesaan. Hal ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu sektor dan meningkatkan keberagaman ekonomi.

Meskipun kontribusi positif, sektor pertanian dihadapkan pada tantangan, terutama terkait dengan perubahan iklim. Variabilitas cuaca, pola hujan yang tidak teratur, dan kejadian ekstrem lainnya dapat berdampak negatif pada produktivitas pertanian. Oleh karena itu, perlu adanya strategi dan investasi dalam prakarsa ketahanan iklim untuk melindungi sektor pertanian dan masyarakat lokal dari dampak perubahan iklim. Dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor

pertanian, perlu dilakukan investasi lebih lanjut dalam teknologi pertanian, pelatihan petani, dan infrastruktur pertanian. Kebijakan yang mendukung seperti insentif pajak, akses ke pasar yang lebih baik, dan pengembangan kebijakan pertanian yang berkelanjutan akan memberikan dorongan tambahan bagi pertumbuhan sektor ini. Dengan demikian, kontribusi sektor pertanian dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di Kabupaten Purworejo.



Gambar 2. 5 Distribusi Tenaga Kerja Menurut Sektor di Kabupaten Purworejo
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo (2023)

Kontribusi tenaga kerja pada sektor ekonomi di Kabupaten Purworejo selama periode tertentu memberikan gambaran tentang peran masing-masing sektor dalam menyediakan lapangan kerja. Pertanian, sebagai sektor utama, memegang posisi dominan dengan kontribusi tenaga kerja mencapai 38,11%, menunjukkan ketergantungan kuat masyarakat pada kegiatan pertanian. Sementara sektor pertambangan memiliki dampak ekonomi yang signifikan, kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja relatif kecil, hanya 0,12%. Sektor manufaktur, dengan kontribusi tenaga kerja sebesar 14,78%, menunjukkan potensi untuk diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih bervariasi. Konstruksi memberikan kontribusi signifikan sebesar 7,15%, mencerminkan aktivitas pembangunan yang dapat menciptakan peluang pekerjaan baru. Perdagangan, dengan kontribusi 16,02%, mencerminkan

kehidupan ekonomi yang dinamis dengan penyerapan tenaga kerja yang signifikan.

Meskipun sektor transportasi dan akomodasi memberikan kontribusi yang relatif kecil, keduanya memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan industri pariwisata. Sektor jasa pendidikan dan jasa kesehatan memberikan kontribusi masing-masing sebesar 4,57% dan 2,04%, menyoroiti pentingnya sektor ini dalam pembentukan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Kategori "Lainnya" dengan kontribusi 10,13% menunjukkan keberagaman sektor lain yang dapat menyerap tenaga kerja, namun perlu diperinci lebih lanjut untuk pemahaman yang lebih mendalam. Dalam keseluruhan, distribusi tenaga kerja ini memberikan indikasi mengenai struktur ekonomi di Kabupaten Purworejo dan potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui diversifikasi sektor dan peningkatan produktivitas.

Sektor pertanian di Kabupaten Purworejo muncul sebagai tulang punggung utama dalam distribusi tenaga kerja, memberikan kontribusi sebesar 38,11% terhadap total tenaga kerja pada tahun yang diamati. Pertanian di wilayah ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pertanian padi, tanaman hortikultura, peternakan, hingga kegiatan agroforestri. Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian mencerminkan pentingnya aktivitas ini dalam menjaga mata pencaharian masyarakat lokal. Pertanian di Kabupaten Purworejo tidak hanya mencakup produksi bahan pangan utama, seperti padi, jagung, dan kedelai, tetapi juga mencakup subsektor hortikultura, termasuk sayuran dan buah-buahan. Peternakan juga memainkan peran penting dalam sektor ini, dengan beternak sapi, kambing, dan ayam menjadi kegiatan yang umum dijumpai.

Di sisi lain, praktik agroforestri semakin mendapatkan perhatian, menggabungkan pertanian dengan penanaman pohon-pohonan untuk memperoleh keuntungan ganda, yaitu hasil pertanian dan manfaat lingkungan. Pemilik lahan sering kali terlibat dalam beragam kegiatan, mulai dari bercocok tanam hingga pemeliharaan ternak, menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan beragam. Walaupun sektor pertanian tetap menjadi pilihan utama bagi banyak penduduk, tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, dan akses terbatas terhadap teknologi modern masih menjadi isu yang perlu diatasi. Upaya untuk meningkatkan produktivitas melalui penerapan teknologi pertanian yang inovatif, pelatihan petani, dan dukungan kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan dapat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini.

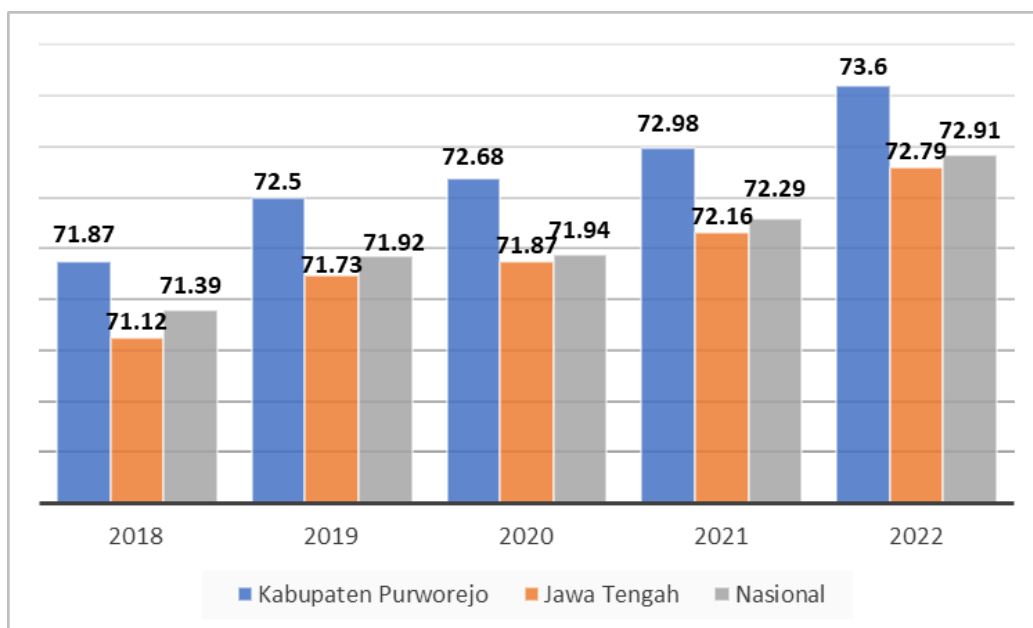
Selanjutnya, diversifikasi dalam pertanian dengan menggabungkan usaha pertanian dan agroindustri dapat menjadi strategi untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja yang lebih beragam. Program pemberdayaan petani dan penyediaan infrastruktur pertanian yang memadai juga dapat mendukung pertumbuhan sektor pertanian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara keseluruhan, sektor pertanian di Kabupaten Purworejo bukan hanya sumber utama mata pencaharian, tetapi juga mencerminkan keberagaman aktivitas dan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Upaya untuk mendukung pertanian melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ini, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

2.3.3 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia telah menjadi fokus utama dalam konsep pembangunan yang baru. Saat ini, paradigma pembangunan telah mengalami pergeseran dari orientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan menuju pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mencapai efisiensi melalui inovasi dan teknologi yang terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Evaluasi sumber daya manusia umumnya menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencakup tiga indikator utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Dalam kerangka pemikiran ini, IPM dianggap sebagai alat yang dapat menjelaskan kondisi pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah karena mencakup aspek kesejahteraan ekonomi, tingkat kehidupan yang layak, dan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan.

Sumber daya manusia memiliki dimensi yang kompleks yaitu pendidikan, kesehatan, kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Intervensi kebijakan juga menyangkut berbagai *stakeholder* dalam rangka mendorong kualitas sumber daya manusia baik fisik, kecerdasan, maupun moral. Sumber daya manusia berkualitas menjadi input dalam perekonomian juga menjaga kondusivitas dan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di daerah. Peran sumber daya manusia sangat sentral mengingat keberlanjutan kehidupan bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang unggul. Dengan itu, sumber daya alam yang terbatas

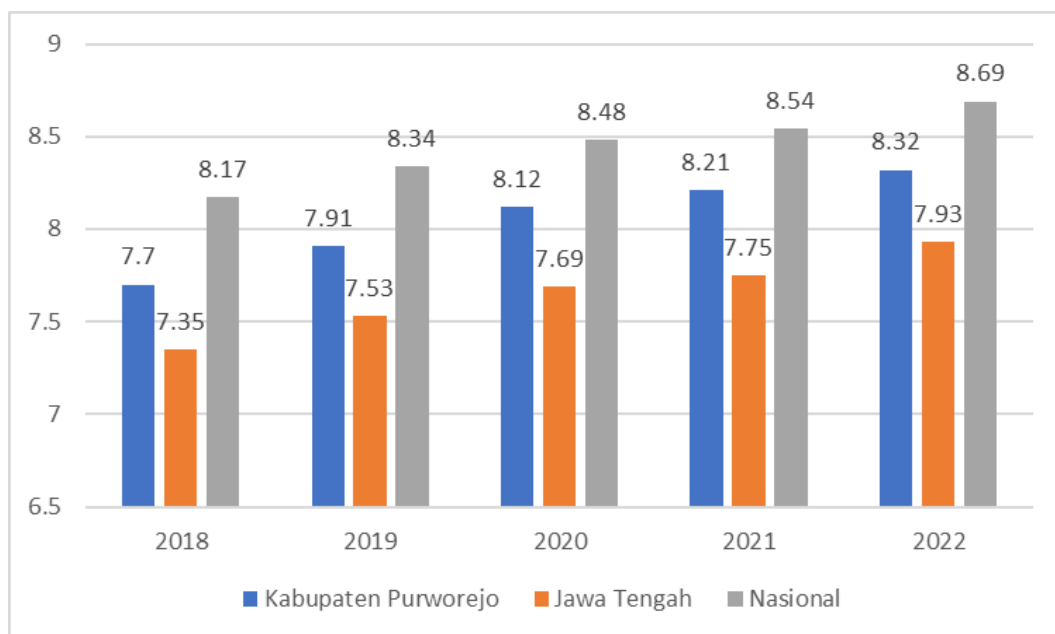
dan berbagai kendala lainnya bisa disolusikan dengan inovasi dan teknologi yang diproduksi oleh sumber daya manusia yang berkualitas.



Gambar 2. 6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo (2023)

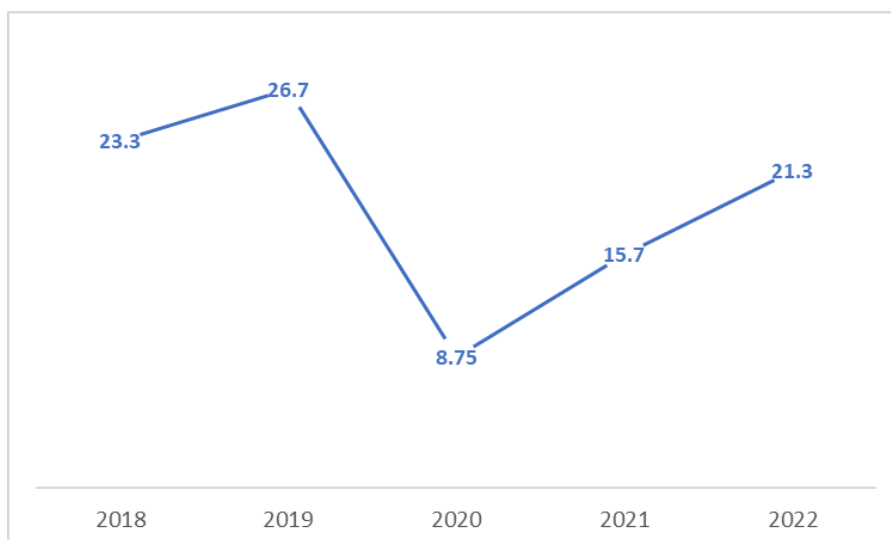
IPM Kabupaten Purworejo telah mencapai nilai yang positif, melebihi 70 poin, yang mengklasifikasikannya sebagai daerah dengan IPM tinggi. Bahkan IPM Kabupaten Purworejo ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPM tingkat nasional dan Jawa Tengah. Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dalam pengembangan sumber daya manusia selama lima tahun terakhir. Di sisi lain, Jawa Tengah dan Indonesia mengalami peningkatan disetiap tahun. Sementara itu, Kabupaten Purworejo hanya mencatat pertumbuhan IPM rata-rata sekitar 0,7 poin per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo berhasil mengikuti tren positif pertumbuhan IPM yang terjadi di tingkat nasional dan provinsi. Hal ini berkaitan dengan masalah kemiskinan ekstrim yang telah dibahas sebelumnya. Penurunan kemiskinan ekstrim dapat berdampak pada daya beli rata-rata penduduk dan pengeluaran untuk konsumsi, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo yang meningkat. Karena itu, di masa mendatang, diperlukan kebijakan publik yang mendorong menstabilkan pertumbuhan IPM di Kabupaten Purworejo.



Gambar 2. 7 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo (2023)

Hal lainnya, pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Purworejo terfokus terutama pada bidang pendidikan, terutama dalam hal rata-rata lama sekolah (RLS). RLS di Kabupaten Purworejo rata-rata tumbuh sekitar 0,2 tahun, yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan RLS di Jawa Tengah, akan tetapi lebih rendah dari RLS nasional. RLS di Kabupaten Purworejo lebih tinggi daripada RLS di Jawa Tengah, dan mengalami pertumbuhan di setiap tahun. Tingkat RLS yang rendah bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat putus sekolah dan partisipasi sekolah. Oleh karena itu, Kabupaten Purworejo perlu mendorong RLS untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Hal ini diperlukan karena wewenang Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menjalankan kewajiban belajar 9 tahun memerlukan intervensi kebijakan yang lebih dinamis.



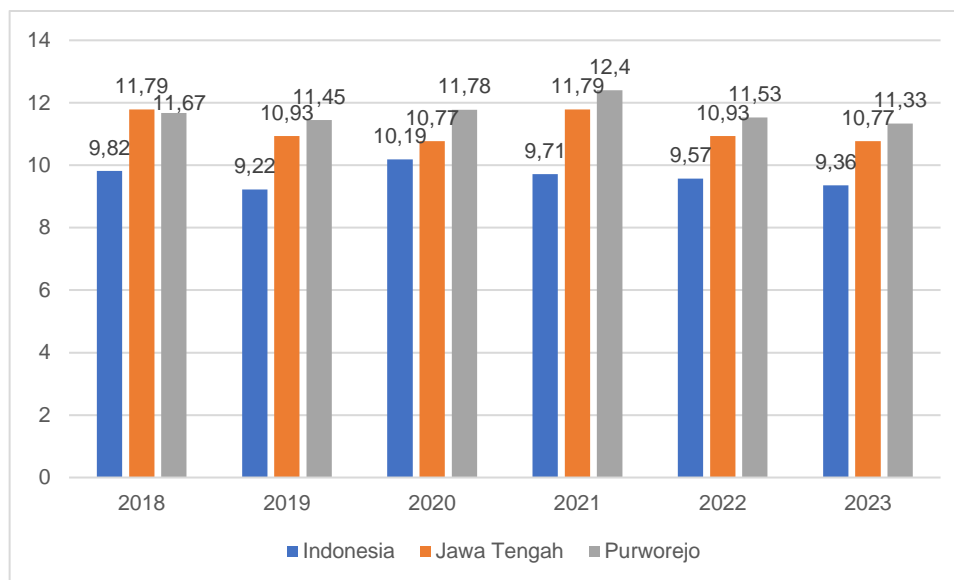
Gambar 2. 8 Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2022

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo (2023); Survey Status Gizi Indonesia (2023)

Di bidang kesehatan, salah satu isu strategis adalah prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo yang fluktuatif bahkan mengalami kenaikan pada tahun 2022. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh kinerja faktor-faktor pencegahan yang tidak optimal. Hal tersebut perlunya memperkuat upaya pencegahan stunting pada balita untuk mencegah risiko stunting kembali muncul. Upaya pencegahan ini dapat dimulai sejak remaja putri dengan memperhatikan kesehatan mereka, calon pengantin, dan ibu hamil. Selain itu, perlu melakukan perbaikan pola gizi dan karantina balita stunting secara lebih intensif guna meningkatkan status gizi balita yang mengalami stunting.

Masalah kemiskinan tetap menjadi permasalahan yang dihadapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan daerah perkotaan juga menghadapi tantangan kemiskinan ekstrim. Di sisi lain, di daerah pedesaan, masalah kemiskinan seringkali terlihat melalui persentase penduduk miskin yang tinggi. Kabupaten Purworejo memiliki tingkat kemiskinan yang tetap di atas rata-rata nasional dan Jawa Tengah hingga tahun 2022. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo juga lebih fluktuatif jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di tingkat nasional dan Jawa Tengah. Sebagaimana Gambar 2.9, selama masa pandemi pada tahun 2020, tingkat kemiskinan nasional menurun sekitar 0,9%, sementara di Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo meningkat sebesar 0,52% dan 0,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa ada lebih banyak penduduk yang rawan atau rentan

terhadap kemiskinan di Kabupaten Purworejo dan Jawa Tengah daripada di tingkat nasional. Dengan kata lain, banyak penduduk yang tinggal di sekitar garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat inilah yang biasanya rentan terhadap kemiskinan, sehingga ketika terjadi guncangan ekonomi, banyak dari mereka yang berisiko jatuh ke bawah garis kemiskinan.



Gambar 2. 9 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2022

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo (2023)

Tabel 2.11 Persentase Penduduk Miskin, Kedalaman Kemiskinan, dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2022

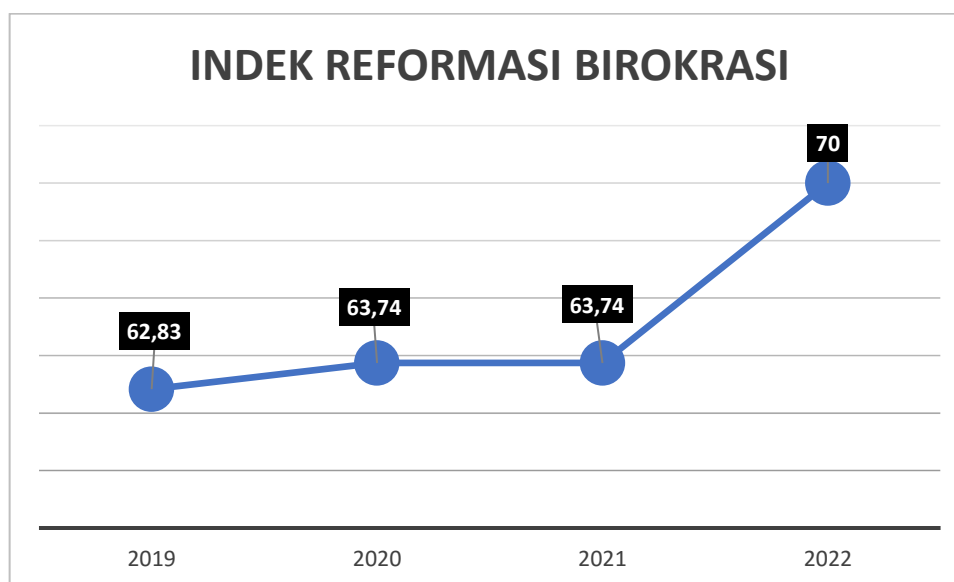
No.	Indikator	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Persentase Penduduk Miskin	11,78	12,40	11,53
2	Kedalaman Kemiskinan	0,98	1,36	1,31
3	Keparahan Kemiskinan	0,12	0,28	0,24

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo (2023)

Selain masyarakat yang rentan miskin, Kabupaten Purworejo juga menghadapi permasalahan pada tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, yang berarti bahwa jumlah individu yang berada dalam kemiskinan ekstrim semakin meningkat dan semakin jauh dari garis kemiskinan. Selain itu, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami peningkatan dalam tiga tahun

terakhir, menunjukkan bahwa ketimpangan di antara masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin memburuk. Oleh karena itu, fokus utama Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah mengatasi kemiskinan ekstrim dan mengurangi ketimpangan di antara masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Mekanisme transfer langsung dan program bantuan lainnya harus diarahkan secara tepat sasaran, terutama kepada kelompok ini. Jika langkah-langkah ini dapat dilaksanakan secara konsisten, maka mungkin saja masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim dapat mendekati atau bahkan melampaui garis kemiskinan.

2.3.4 Tata Kelola Pemerintahan



Gambar 2. 10 Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2022

Sumber: RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026 (2021)

Tata kelola pemerintahan berperan sebagai fungsi pengendalian pemerintah daerah yang bertujuan untuk memastikan lingkungan bisnis yang kondusif serta ekosistem sosial ekonomi yang stabil. Selain itu, tata kelola pemerintahan juga merupakan pondasi bagi kebijakan publik, karena perencanaan pembangunan dibuat melalui kerangka kerja ini. Bahkan, penilaian pencapaian dan pelaksanaan kebijakan juga menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan. Terutama dalam hal data penduduk, administrasi pelayanan, birokrasi, dan layanan dasar lainnya, tata kelola pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Purworjo telah melakukan upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. Indikator terkait tata kelola keuangan dan akuntabilitas yang menunjukkan kinerja yang baik. Selain itu, perkembangan indeks reformasi birokrasi juga mencerminkan peningkatan yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Nilai indeks reformasi birokrasi di kisaran 60-70 tergolong sebagai baik (B), menunjukkan bahwa AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sudah baik disebagian besar unit kerja, terutama di unit kerja utama. Namun, masih ada beberapa unit kerja yang perlu sedikit perbaikan, serta perlu komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja saat ini hanya dilaksanakan hingga level eselon 2/unit kerja.

BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pembangunan daerah merupakan upaya strategis yang bertujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah tertentu. Proses ini melibatkan berbagai aspek dan sektor dengan tujuan menciptakan dampak positif yang luas bagi penduduk setempat. Salah satu fokus utama pembangunan daerah adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut. Selain itu, pembangunan daerah juga melibatkan upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup secara langsung, tetapi juga membantu mengurangi ketidakesetaraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dengan demikian, pembangunan daerah berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang baik bagi masyarakat.

Pengembangan daerah juga melibatkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan pelestarian alam, perlindungan sumber daya alam, upaya mitigasi terhadap perubahan iklim, manajemen limbah yang efisien, dan pelestarian ekosistem. Untuk mencapai kemajuan pembangunan yang berhasil di suatu wilayah, kerjasama erat antara entitas pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional sangatlah penting. Dengan menerapkan pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dan mempertimbangkan semua aspek secara menyeluruh, pembangunan daerah dapat menciptakan dampak yang positif yang dapat berkelanjutan dan bermanfaat bagi penduduk di wilayah tersebut.

Pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dan memengaruhi satu sama lain dalam berbagai cara. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seringkali menjadi salah satu tujuan utama dalam pembangunan daerah. Ketika sektor-sektor ekonomi berkembang, lapangan pekerjaan tercipta, pendapatan masyarakat meningkat, dan investasi dalam infrastruktur serta layanan publik menjadi mungkin. Ini meningkatkan kualitas

hidup penduduk setempat dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Sebaliknya, pembangunan daerah yang berhasil juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Kualitas infrastruktur yang baik, seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi, membantu perusahaan lokal dan internasional untuk beroperasi dengan lebih efisien. Selain itu, kebijakan yang mendukung investasi dan kewirausahaan dapat mengundang modal investasi ke daerah tersebut, menciptakan peluang kerja dan meningkatkan produksi ekonomi lokal. Dalam proses ini, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan daerah yang sukses menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan di mana penduduk dapat mengalami peningkatan kualitas hidup sambil menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik. Namun, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan budaya untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 meningkat sebesar 5,36 persen (Badan Pusat Statistik, 2023). Sektor dengan laju pertumbuhan terbesar pada kategori transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 56,82 persen. Kemudian diikuti oleh kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,89 persen. Kondisi tersebut yang dialami Kabupaten Purworejo disebabkan oleh pandemic Covid-19 sehingga Sektor yang memiliki dampak besar bagi Kabupaten Purworejo di dominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di sisi lain, sektor lain juga memberikan kontribusi bagi laju perekonomian Kabupaten Purworejo. Meningkatkan perekonomian diperlukannya riset dan inovasi untuk berkembangnya perekonomian dalam suatu wilayah terutama Kabupaten Purworejo.

Peran riset dan inovasi dalam percepatan ekonomi daerah sangat penting dan strategis. Riset yang kuat dan inovasi yang berkelanjutan dapat membuka peluang baru, meningkatkan daya saing, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui riset, daerah dapat memahami lebih baik potensi sumber daya alam dan manusia yang dimilikinya. Ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang berpotensi untuk pengembangan lebih lanjut. Inovasi, di sisi lain, melibatkan penerapan ide-ide baru, teknologi, dan praktik bisnis yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan adanya inovasi, daerah dapat

menciptakan nilai tambah dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, industri, dan layanan. Dengan demikian, riset dan inovasi tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas produk dan layanan, dan membantu daerah bersaing di pasar global yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, investasi dalam riset dan inovasi adalah investasi yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah. Melalui riset, daerah dapat mengidentifikasi peluang ekonomi yang potensial, menganalisis kebutuhan pasar, dan mengembangkan strategi pengembangan ekonomi yang tepat. Riset juga memungkinkan daerah untuk memahami perubahan tren pasar, memprediksi perkembangan masa depan, dan merumuskan kebijakan yang relevan. Data dan analisis yang diperoleh melalui riset dapat membantu pemangku kepentingan lokal membuat keputusan yang lebih baik dan berdasarkan bukti.

Disisi lain, inovasi merupakan proses yang melibatkan pengembangan ide, penerapan teknologi, dan strategi pemasaran produk atau layanan yang dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek ekonomi. Dengan inovasi, produk atau layanan yang ada dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, menciptakan nilai tambah bagi konsumen, dan memperluas pangsa pasar. Adopsi inovasi oleh suatu daerah memiliki potensi untuk meningkatkan daya saingnya di tingkat regional, nasional, bahkan global. Selain itu, inovasi juga dapat menjadi katalisator bagi transformasi ekonomi daerah dengan membuka peluang bagi sektor ekonomi lokal untuk beralih ke sektor yang lebih maju dan berdaya saing, seperti teknologi informasi, energi terbarukan, atau industri kreatif. Di tengah era globalisasi dan transformasi digital, kemampuan untuk berinovasi telah menjadi faktor kunci dalam meraih keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, upaya yang diberikan untuk merangsang riset dan inovasi di daerah dapat membuka pintu menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat.

3.1 Tantangan

Percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan memanfaatkan riset dan inovasi memiliki sejumlah hambatan yang perlu diatasi agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Beberapa dari tantangan-tantangan ini meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya Finansial

Melaksanakan riset dan mengembangkan inovasi memerlukan investasi finansial yang signifikan, baik untuk peralatan, sumber daya manusia, atau infrastruktur penelitian. Keterbatasan sumber daya finansial bisa menjadi hambatan serius dalam menggerakkan inisiatif riset dan inovasi.

2. Keterbatasan Keterampilan dan Keahlian (Daya Saing Sumber Daya Manusia)

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam riset dan inovasi, diperlukan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan. Kurangnya akses ke sumber daya manusia terampil atau kurangnya peluang pendidikan dan pelatihan dapat menjadi hambatan.

3. Keterbatasan Forecasting Terhadap Riset dan Inovasi di Masa Depan

Riset dan Inovasi harus menjadi basis dalam pengambilan dan implementasi kebijakan atau saat ini disebut Kebijakan Berbasis Bukti. Kelemahan dalam melakukan forecasting (peramalan) tentang kebutuhan riset dan inovasi daerah di masa depan menjadi kendala utama. Keterbatasan forecasting ini bisa terjadi akibat hambatan sinkronisasi dokumen perencanaan atau fokus kebijakan yang kabur. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan forecasting perangkat daerah menjadi urgen untuk dilakukan seiring dengan upaya peningkatan ekosistem riset dan inovasi yang mendorong kebijakan berbasis bukti.

4. Rendahnya Tingkat Adopsi Inovasi

Rendahnya tingkat adopsi inovasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Resistensi terhadap perubahan sering kali menjadi penghalang utama. Individu dan organisasi cenderung nyaman dengan cara-cara yang sudah dikenal dan teruji, dan mereka mungkin takut bahwa mengadopsi inovasi baru akan mengganggu rutinitas atau berisiko. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang manfaat konkret dari inovasi dan ketidakpastian terkait dengan hasilnya dapat membuat orang enggan mencobanya. Terkadang infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan inovasi mungkin tidak tersedia atau mahal. Ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, atau pelatihan yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi baru. Kurangnya akses atau sumber daya ini bisa menjadi penghambat serius. Untuk mengatasi rendahnya tingkat adopsi inovasi, perlu upaya komunikasi yang kuat untuk memahamkan orang tentang manfaatnya, pelatihan yang memadai untuk mempersiapkan mereka dalam mengadopsi inovasi, serta upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan praktis

seperti infrastruktur yang kurang memadai. Dengan upaya yang tepat, tingkat adopsi inovasi dapat ditingkatkan, dan inovasi dapat memberikan dampak positif yang lebih besar dalam pengembangan ekonomi daerah.

6. Tantangan Keberlanjutan

Inovasi harus mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan. Perlindungan lingkungan dan beradaptasi dengan perubahan iklim adalah isu-isu penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan inovasi.

3.2 Peluang

Era globalisasi dan perubahan digital yang cepat, riset dan inovasi menjadi unsur kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Secara ideal, percepatan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan pada riset dan inovasi seharusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Meskipun demikian, untuk mencapai target ini, berbagai hambatan harus diatasi. Tantangan-tantangan ini mencakup keterbatasan dalam infrastruktur penelitian, rendahnya tingkat kolaborasi antara sektor publik dan swasta, masalah pendanaan yang terbatas, kekurangan keterampilan yang relevan, serta kesulitan dalam memastikan keberlanjutan dan adopsi inovasi. Meskipun tantangan-tantangan ini dapat menjadi hambatan, ada juga peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasinya.

1. Kemitraan dan Kolaborasi

Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga penelitian adalah kunci untuk mengatasi tantangan dalam riset dan inovasi. Kemitraan ini memungkinkan berbagi sumber daya, pengetahuan, dan keahlian, serta memfasilitasi akses ke dana dan infrastruktur penelitian. Keterlibatan sektor swasta juga mempercepat komersialisasi inovasi.

2. Kuantitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

Jumlah sumber daya manusia memberikan peluang untuk ditingkatkan kualitasnya setidaknya dalam rangka mengawasi dan mensinergikan riset dan inovasi di daerah. Kuantitas sumber daya manusia ini perlu dibekali dengan kapasitas minimum untuk menjalankan fungsi riset dan inovasi di daerah.

3. Pendanaan Alternatif

Pendanaan dari sumber-sumber alternatif seperti sektor swasta, kemitraan publik-swasta, dan skema berbasis proyek penting dalam mendukung riset dan

inovasi. Ini membantu mengatasi keterbatasan pendanaan dan mendorong aktivitas riset yang inovatif.

4. Regulasi dan Kebijakan

Regulasi yang mendukung riset dan inovasi, seperti insentif fiskal, perlindungan kekayaan intelektual, dan penyederhanaan prosedur administratif, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi berbasis riset dan inovasi. Melalui upaya ini, pemerintah daerah dapat menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purworejo dan daerah-daerah sejenisnya.

BAB IV

ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Riset dan inovasi di daerah merupakan pangkal dari perencanaan dan implementasi Pemerintah Daerah. Kebijakan yang berlandaskan pada riset dan inovasi diharapkan mampu membangun efektivitas (tepat sasaran) dan efisiensi (penghematan) anggaran. Efektivitas dan efisiensi ini yang seharusnya bisa diukur (*mesurable*) melalui riset sebelum kebijakan direncanakan dan diimplementasikan. Sedangkan, inovasi berperan memberikan dampak optimal karena adanya peran rekayasa dan teknologi kebijakan publik. Ini merupakan definisi kebijakan berbasis bukti bahwa riset dan inovasi menjadi landasan perencanaan dan implementasi kebijakan yang efektif dan efisien.

Ekosistem riset dan inovasi di daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai riset dan inovasi di daerah (Pasal 1 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah). Pada dasarnya, ekosistem riset dan inovasi di daerah menjadi keragaan interaksi antar elemen yang mendukung terciptanya riset dan inovasi di daerah. Melalui BRIN, Pemerintah Indonesia mendorong adanya perbaikan dan pematapan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Dengan terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang mumpuni di daerah, Pemerintah berekspektasi adanya peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik melalui basis riset dan inovasi yang dimiliki. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat diakselerasi melalui riset dan inovasi terutama dalam implementasi inovasi teknologi.

Sebagaimana Pasal 23 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, ekosistem riset dan inovasi di daerah terbagi menjadi elemen antara lain: (1) kebijakan dan infrastruktur

riset inovasi di daerah; (2) kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset inovasi di daerah; (3) kemitraan riset inovasi di daerah; (4) budaya riset inovasi di daerah; (5) keterpaduan riset inovasi di daerah; dan (6) penyelarasan dengan perkembangan global. Analisis kesenjangan pada bagian ini dibutuhkan untuk mengkaji standar ekosistem yang disarankan BRIN dengan realitas yang ada saat ini, sehingga pemerintah daerah melalui BRIDA dapat memperbaiki dan mengembangkan ekosistem berdasarkan analisis kesenjangan ini.

4.1 Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah

Elemen pertama dalam analisis kesenjangan ekosistem riset dan inovasi di daerah adalah kebijakan dan infrastruktur. Ini merupakan hal mendasar yang berkenaan dengan daya dukung pemerintah daerah untuk memasukkan agenda pengembangan ekosistem riset dan inovasi ke dalam agenda kebijakan. Hal ini juga termasuk ketersediaan infrastruktur dan upaya melengkapinya melalui kebijakan pemerintah daerah. Elemen kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah merupakan elemen utama untuk mengembangkan ekosistem riset dan inovasi. Di dalamnya, terdapat 6 indikator terkait kebijakan dan infrastruktur. Melalui 6 indikator ini, pemerintah daerah dapat memiliki acuan yang cukup untuk menentukan kekurangan (gap) antara standar ekosistem riset dan inovasi dengan realitas yang ada di daerah.

Tabel 3.1 Analisis Kesenjangan Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
1	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	- Tersedia peraturan daerah mengenai pemajuan IPTEK dan Riset Inovasi daerah	- Tersedia Perda No. 7 Tahun 2020 tentang SIDA - Belum tersedia Perda Ekosistem

NO.	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
			Riset dan Inovasi Daerah - Belum tersedia
		- Tersedia rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK, riset, dan inovasi daerah	
2	Penataan basis data riset dan inovasi	- Tersedia basis data riset dan inovasi yang terbuka dan mudah diakses	- Tersedia Satu Data Purworejo - Belum Tersedia Data Base Hasil Riset dan Inovasi
3	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	- Tersedia infrastruktur dasar riset meliputi laboratorium, kebun raya, studio riset, dan fasilitas lainnya	- Tersedia Laboratorium Kesehatan Daerah - Belum Tersedia Laboratorium, Studio Riset, Pusat Kekayaan Intelektual, dan Kebun Raya
4	Pengelolaan kebun raya daerah	- Tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah	- Belum tersedia
5	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	- Tersedia anggaran riset dan inovasi daerah	- Tersedia anggaran Rp1miliar hingga Rp1,5miliar per tahun (Renja 2024)
6	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan	- Tersedia laboratorium dan/atau inkubator	- Belum tersedia

NO.	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
	kekayaan intelektual	kekayaan intelektual di daerah	

Kebijakan terkait mendorong riset dan inovasi di daerah menjadi pangkal utama bagi Bappedalitbang untuk mengeksekusi kegiatan riset dan inovasi di daerah. Oleh karena itu, kepastian hukum berupa peraturan daerah (perda) dan/atau peraturan bupati (perbup) sangat krusial untuk mengatur kegiatan dan pengembangan riset dan inovasi. Selain itu, tata aturan hukum ini menjadi acuan dan panduan bagi pemangku kepentingan atau perangkat daerah dalam melaksanakan riset dan inovasi serta menyelaraskannya dengan kebijakan dan rencana aksi di masing-masing perangkat daerah. Kemudian, turunan dari kebijakan dan regulasi ini adalah rencana induk dan peta jalan riset dan inovasi daerah. Ketersediaan rencana induk dan peta jalan riset dan inovasi di daerah dapat menjadi pedoman dalam melakukan riset dan inovasi yang selaras dengan kebutuhan dan permasalahan daerah, efisien dalam penggunaan anggaran, dan terukur sistematis dalam menghasilkan hasil riset dan inovasi di daerah. Pada 2020 lalu, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah memiliki dokumen penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Selain itu, Bappedalitbang Kabupaten juga sudah memiliki Rencana Induk Kelitbangan yang telah disusun tahun 2022. Kekurangannya kedua dokumen ini hanya pada ketiadaan tema prioritas dan penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah sebagaimana amanah Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Oleh karena itu, pengadaan tata aturan hukum baik perda maupun perbup dan rencana induk dan peta jalan riset dan inovasi di daerah menjadi penting sebagai dasar dalam kebijakan pengembangan dan penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah.

Berikutnya, indikator penataan basis data riset dan inovasi belum tersedia di Kabupaten Purworejo. Data-data sekunder relatif rapi tertata pada basis data satu <https://satudata.purworejokab.go.id/>. Basis data hasil

riset dan inovasi Kabupaten Purworejo belum tersedia sehingga belum bisa diakses hasil Kreanova (Lomba Kreasi dan Inovasi) dan hasil riset dan inovasi yang semestinya bebas akses sebagai barang publik. Berikutnya, usulan tema atau sasaran riset dan inovasi juga belum dengan baik dalam sistem yang terstruktur. Kekurangan pada indikator ini adalah akses yang terbatas terhadap basis data riset dan inovasi sehingga dokumen tidak dapat didiseminasi secara luas. Padahal dokumen hasil riset dan inovasi merupakan barang publik yang seharusnya bisa diakses oleh masyarakat dan perangkat daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan dan aksi layanan publik. Kelemahan lainnya pada ekosistem riset dan inovasi di daerah Kabupaten Purworejo adalah minimnya infrastruktur dasar terutama laboratorium, kebun raya, dan studio riset. Akan tetapi, laboratorium kesehatan daerah sudah tersedia. Meski demikian, infrastruktur dasar ini juga perlu disesuaikan dengan kapasitas keuangan dan sumber daya manusia riset dan inovasi di Kabupaten Purworejo. Jika pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi tidak sejalan dengan potensi dan kebutuhan, maka agenda ini dapat dieliminasi.

Sejalan dengan infrastruktur dasar tersebut, pengelolaan kebun raya daerah menjadi salah satu indikator dalam elemen kebijakan dan infrastruktur dasar riset dan inovasi daerah. Kabupaten Purworejo belum memiliki kebun raya sebagai pusat penelitian, pengembangan, dan konservasi alam, maka perlu konsepsi ulang dalam penyediaannya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Belum adanya pusat inkubator kekayaan intelektual berpotensi riset dan inovasi yang dihasilkan di Kabupaten Purworejo diimitasi dan diakui oleh pihak lain. Maka, peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual perlu dilakukan seperti pendaftaran hak cipta, hak paten, hak merek, dan sebagainya.

4.2 Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Daerah

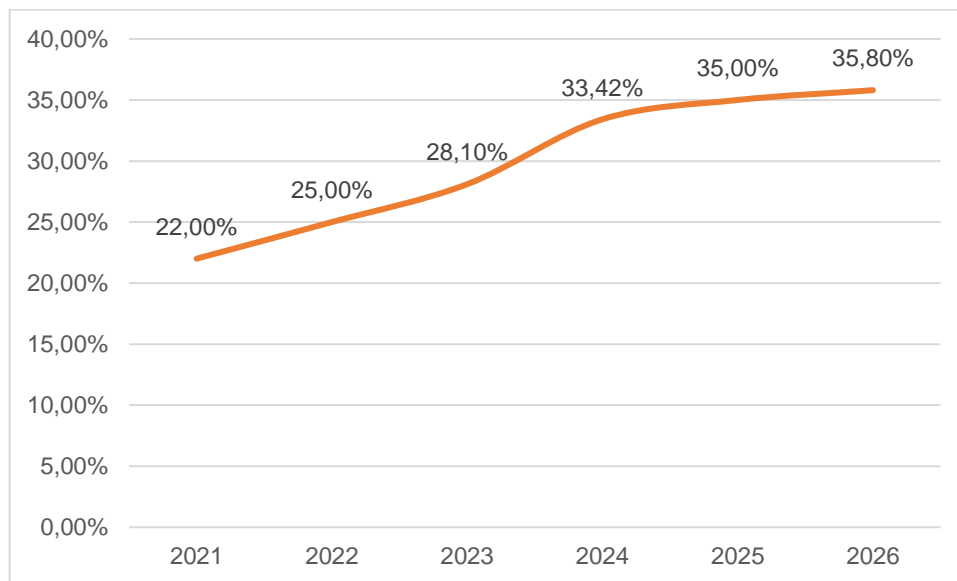
Ekosistem riset dan inovasi di daerah tumbuh berdasarkan kapasitas kelembagaan dan daya dukungnya. Kelembagaan dan daya dukung yang dimaksud adalah sistem dan mekanisme interaksi organisasi dengan lingkungannya yang diatur melalui tata aturan yang mengikat untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan riset dan inovasi di daerah. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi daerah ditentukan oleh dua indikator antara lain adalah penguatan kolaborasi riset dan inovasi dan penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi.

Tabel 3.2 Analisis Kesenjangan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
1	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	- Terwujudnya kolaborasi tata kelola riset dan inovasi daerah antara Bappedalitbang dengan pemangku kepentingan	- Belum Tercapai, tingkat implementasi hasil riset dan inovasi masih rendah
2	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	- Tersedia sarana pendukung riset dan inovasi di daerah antara lain perpustakaan, ruang baca, pusat studi, jaringan internet, dan teknologi informasi.	- Tersedia, dengan perlu adanya peningkatan sarana pendukung terutama pusat studi dan teknologi informasi.

Kolaborasi riset dan inovasi di Kabupaten Purworejo telah terlaksana dengan baik yaitu melibatkan seluruh perangkat daerah. Kolaborasi ini

dilaksanakan pada program kegiatan kajian, riset dan inovasi juga kompetisi Kreanova (Kreasi dan Inovasi). Pada kolaborasi kajian, perangkat daerah dilibatkan pada tahap pembahasan dokumen sejak laporan pendahuluan, laporan antara, hingga laporan akhir. Akan tetapi, kolaborasi ini akan lebih baik jika kolaborasi bisa dilaksanakan lebih intensif misalnya pada tahap pelaksanaan kajian sehingga hasil kajian lebih implementatif dan teknis.



Gambar 4. 1 Baseline dan Target Kinerja Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo

Pada indikator kolaborasi, hal yang menjadi kelemahan ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Purworejo adalah rendahnya tingkat pemanfaatan atau implementasi hasil riset dan inovasi oleh perangkat daerah. Maka, implementasi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi ini perlu diakselerasi untuk mewujudkan kebijakan berbasis bukti. Selanjutnya, sebagai sarana penunjang, keberadaan perpustakaan, ruang baca, pusat studi, dan teknologi informasi juga mampu mendorong ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik. Perpustakaan dan ruang baca telah menjadi kebutuhan dasar pendidikan yang berhasil diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo. Hanya saja, sarana pendukung pusat studi dan teknologi informasi yang belum tersedia dengan baik. Tentunya, hal ini

selaras dengan potensi dan target sasaran pembangunan daerah Kabupaten Purworejo.

4.3 Kemitraan Riset Dan Inovasi Daerah

Ekosistem riset dan inovasi di daerah didukung oleh adanya kemitraan antar perangkat daerah yang solid dan harmonis. Bappedalitbang sebagai penyelenggara pusat riset dan inovasi di daerah butuh bermitra dengan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kebijakan publik sekaligus pengguna hasil riset dan inovasi. Dalam elemen kemitraan ini, ada 3 indikator kunci dalam menciptakan kemitraan riset dan inovasi daerah yang solid dan harmonis, yaitu kemitraan antar kelembagaan, difusi inovasi, dan praktik dan diseminasi hasil riset dan inovasi.

Tabel 3.3 Analisis Kesenjangan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
1	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	- Terselenggara kerjasama antara lembaga riset daerah, OPD terkait, dan lembaga riset profesional lainnya	- Terselenggara, dengan perlu peningkatan intensitas terutama dengan OPD terkait untuk pelaksanaan dan implementasi hasil riset dan inovasi
2	Peningkatan difusi inovasi	- Terwujud perkembangan dan penyebaran isu dan atensi terhadap	- Terwujud, belum merata

NO.	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
		pengembangan inovasi di daerah	
3	Peningkatan praktik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	- Terpublikasi hasil riset dan inovasi kepada OPD terkait dan masyarakat umum - Terimplementasi kebijakan publik berbasis hasil riset dan inovasi	- Belum terpublikasi hasil KreaNova dan Kajian, Riset, Inovasi di Daerah - Terimplementasi sebagian, sekitar 20-30% hasil riset dan inovasi

Aktivitas riset dan inovasi di Kabupaten Purworejo telah berjalan dengan baik. Kemitraan Bappedalitbang Kabupaten Purworejo dengan perangkat daerah seharusnya berlansung sejak penyampaian usulan tema kajian, riset, dan inovasi. Sebagian usulan telah terlaksana sesuai dengan prioritas, arah kebijakan, dan isu strategis pemerintah daerah. Hal lain yang menentukan adalah prioritas kegiatan sesuai kapasitas anggaran yang dikelola. Catatan penting lainnya adalah perlu adanya peningkatan implementasi hasil riset dan inovasi daerah yang telah diciptakan. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa sebagian hasil riset dan inovasi tidak diimplementasikan oleh perangkat daerah sebagai pengguna hasil riset dan inovasi bahkan sebesar 70% hasil riset dan inovasi. Kemudian, ini pula yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik berbasis hasil riset dan inovasi yang belum optimal di Kabupaten Purworejo. Masalah-masalah yang muncul dari belum optimalnya implementasi hasil riset dan inovasi di Kabupaten Purworejo adalah keterputusan komunikasi antar perangkat daerah, pemahaman perangkat daerah yang belum komprehensif, dan monitoring evaluasi atas implementasi hasil riset dan inovasi daerah.

Kemitraan riset juga diukur berdasarkan penyebaran isu dan atensi terhadap inovasi dan riset strategis daerah (difusi inovasi dan riset).

Bappedalitbang Kabupaten Purworejo telah melakukan difusi inovasi dan riset melalui berbagai kegiatan kompetisi, pameran, dan publikasi lainnya. Hanya saja, difusi ini belum mengarah pada isu strategis yang spesifik yang sedang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo. Sayangnya, diseminasi hasil riset belum dilakukan dengan mempublikasikan hasil riset dan inovasi berbasis database digital seperti website atau sejenisnya oleh Bappedalitbang Kabupaten Purworejo. Kedepan, hal ini perlu dipublikasikan lebih terbuka untuk dapat diakses oleh perangkat daerah dan masyarakat. Selain itu, publikasi hasil riset dan inovasi melalui jurnal milik Bappedalitbang Kabupaten Purworejo juga perlu perbaikan terutama pada sistem informasi website, keselarasan dengan hasil riset dan inovasi daerah, konsistensi penerbitan dan perluasan kontributor jurnal.

4.4 Budaya Riset Dan Inovasi Di Daerah

Budaya riset dan inovasi di daerah memegang peran penting untuk menciptakan keberlanjutan riset dan inovasi di daerah. Budaya ini memastikan pola perilaku dan nilai yang dianut dalam konteks ekosistem riset dan inovasi di daerah terus berlangsung dan berkembang. Sebagaimana definisi budaya sebagai nilai yang dilimpahkan turun temurun, budaya riset dan inovasi di daerah juga diharapkan mampu membangun nilai ekosistem riset dan inovasi di daerah yang tersebar di masyarakat dan dilimpahkan turun temurun. Oleh karena itu, indikator dari elemen ini antara lain promosi dan kampanye inovasi, apresiasi prestasi inovasi, pengembangan perusahaan pemula berbasis riset, dan inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi di masyarakat.

Pembentukan budaya riset dan inovasi di daerah dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme. Salah satunya dengan promosi dan kampanye riset dan inovasi di daerah. Promosi dan kampanye ini bertujuan untuk menciptakan partisipasi dan perilaku untuk mengembangkan riset dan inovasi di daerah. Bappedalitbang Kabupaten Purworejo telah

melakukan promosi dan kampanye melalui program kompetisi Kreanova, pameran inovasi, dan diseminasi hasil riset dan inovasi. Ini pun dilakukan meluas bagi perangkat daerah dan masyarakat umum, dan berjenjang dari masyarakat umum dan pelajar di tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Ini diharapkan mampu mendorong budaya riset dan inovasi di daerah yang terus tumbuh dan berkelanjutan. Melalui kegiatan tersebut, apresiasi terhadap prestasi para inovator juga dilakukan sesuai dengan kebijakan dan kapasitas anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.

Tabel 3.4 Analisis Kesenjangan Budaya Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
1	Promosi dan kampanye inovasi	- Terselenggara promosi dan kampanye inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan masyarakat Kabupaten Purworejo	- Terselenggara melalui kegiatan Kreanova, pameran inovasi, dan diseminasi hasil riset dan inovasi
2	Apresiasi prestasi inovasi	- Terselenggara kegiatan kompetisi dan apresiasi hasil inovasi Perangkat Daerah dan masyarakat Kabupaten Purworejo	- Terselenggara melalui kegiatan Kreanova, pameran inovasi, dan diseminasi hasil riset dan inovasi
3	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	- Terlaksana upaya inisiasi dan peran serta Pemerintah Daerah untuk mendorong pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	- Belum terlaksana

NO.	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
4	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Terinventarisasi data karya pengetahuan dan teknologi masyarakat - Terdapat kegiatan untuk mendorong pengembangan pengetahuan dan teknologi masyarakat - Terdapat kegiatan untuk melindungi hasil pengetahuan dan teknologi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Terinventaris data dengan baik - Terealisasi - Belum terealisasi perlindungan HaKI hasil riset dan inovasi

Dalam rangka menguatkan budaya riset dan inovasi, keberadaan berbagai institusi riset dan inovasi yang lebih beragam dapat meningkatkan kualitas ekosistem riset dan inovasi. Saat ini, perkembangan perusahaan pemula berbasis riset tengah mendapat atensi dan animo yang besar di masyarakat. Pemerintah daerah dapat mendorong penciptaan dan pengembangan perusahaan pemula berbasis riset dengan membangun kemistraan yang lebih dinamis. Perusahaan pemula berbasis riset ini terutama jika berada di daerah tentunya kebijakan ini harus didasarkan pada potensi dan kapasitas pemerintah daerah. Terakhir, inventarisasi data karya pengetahuan dan teknologi masyarakat yang telah terealisasi perlu dipertahankan secara berkelanjutan. Hal lain yang urgen untuk ditambahkan dan ditingkatkan adalah perlindungan terhadap hasil pengetahuan dan teknologi masyarakat. Sebagaimana dibahas di beberapa bagian sebelumnya, pengetahuan dan teknologi masyarakat termasuk hasil riset dan inovasi perlu perlindungan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, hak merek, dan sebagainya. Ini menjamin hasil riset dan inovasi dapat digunakan secara jangka panjang.

Selain itu, ini juga menjamin hak karya bagi para pencipta dan inovator yang telah berkarya sebagai bentuk apresiasi yang terbaik.

4.5 Keterpaduan Riset Dan Inovasi Daerah

Riset dan inovasi terbaik adalah keselarasan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah, produk unggulan yang menjadi target sasaran, dan solutif terhadap permasalahan di daerah. Elemen keterpaduan riset dan inovasi di daerah menjadi elemen yang penting untuk diukur. Elemen ini merupakan ukuran kegiatan riset dan inovasi di daerah telah selaras dengan kondisi di daerah. Sumber daya berupa infrastruktur dan sarana penunjang akan efektif dan efisien jika peruntukannya sejalan dengan kebutuhan, permasalahan, dan produk unggulan daerah. Ekosistem riset dan inovasi bukan sekedar menciptakan kondisi dan kondimen di dalamnya, akan tetapi lebih dari itu, ekosistem riset dan inovasi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah melalui penciptaan solusi atas berbagai masalah di daerah.

Bappedalitbang Kabupaten Purworejo telah memprakarsai berbagai program kegiatan riset dan inovasi daerah, antara lain program kajian dan riset, dan inovasi melalui kompetisi Kreanova. Kajian dan riset telah dijalankan berdasarkan usulan perangkat daerah dan target sasaran pemerintah daerah. Perbaikan perlu dilakukan pada program kompetisi Kreanova yang terlihat memiliki lingkup yang sama dari beberapa tahun terakhir. Artinya, penyelarasan dan keterpaduan program kompetisi Kreanova dengan kebutuhan dan permasalahan di daerah belum optimal dilakukan. Penyelarasan dan keterpaduan ini dapat meningkatkan serapan hasil riset dan inovasi untuk diimplementasikan oleh perangkat daerah sehingga hasil riset dan inovasi lebih implementatif dan berdampak bagi penyelesaian masalah di daerah.

Tabel 3.5 Analisis Kesenjangan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
1	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan di daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksana kegiatan pengembangan riset dan inovasi di daerah - Terdapat konsepsi untuk menyelaraskan kegiatan pengembangan riset dan inovasi dengan kebutuhan dan/atau permasalahan di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksana, dengan perlu pengembangan dan penyempurnaan - Belum terealisasi di kegiatan riset dan inovasi serta KreaNova yang sejalan dengan permasalahan di daerah dan kebutuhan OPD
2	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat peta produk unggulan, potensi, dan investasi di Kabupaten Purworejo - Terselenggara kegiatan riset dan inovasi berbasis produk unggulan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terealisasi - Belum terealisasi
3	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kesesuaian dan keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Terealisasi

Indikator berikutnya adalah pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah memiliki dokumen peta potensi dan investasi produk unggulan daerah untuk menjadi pedoman pemangku kebijakan. Sayangnya, dokumen ini belum dilengkapi dengan analisis produk unggulan daerah. Analisis produk unggulan daerah hanya menggunakan analisis sektor basis yang mengukur indikator makroekonomi di daerah berupa sektor-sektor basis yang potensial dan beberapa indikator produksi dan produktivitas. Maka, penyempurnaan dokumen berupa analisis produk unggulan penting untuk dilakukan. Setelah, analisis produk unggulan dilakukan, riset dan inovasi lanjutan dapat dilakukan dengan klasterisasi riset dan inovasi berbasis produk unggulan tersebut. Analisis dan klasterisasi riset dan inovasi produk unggulan ini yang belum terealisasi di Kabupaten Purworejo yang kedepan perlu untuk dilakukan untuk optimalisasi potensi daerah dan efektivitas arah kebijakan pemerintah daerah.

4.6 Penyeragaman Dengan Perkembangan Global

Pada bagian akhir ini, ekosistem riset dan inovasi daerah butuh mengakomodir isu internasional yang dapat mempengaruhi kondisi di daerah. Keterkaitan dengan dunia internasional cukup penting untuk dilakukan bukan hanya mengantisipasi kemungkinan krisis dan sebagainya. Akan tetapi, dalam kerangka pikir riset dan inovasi, keterkaitan dengan isu internasional termasuk mengakomodir metode riset dan inovasi terbaru, seperti perkembangan teknologi dan pendekatan ilmiah lainnya. Elemen penyeragaman dengan perkembangan global perlu dipertimbangkan untuk memberikan perspektif yang beragam dalam melaksanakan riset dan inovasi di daerah.

Tabel 3.6 Analisis Kesenjangan Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah dengan Perkembangan Global di Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	TARGET	KONDISI RIIL
1	Peningkatan kepedulian terhadap isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	- Adaptasi dan penyelarasan isu internasional terhadap kegiatan riset dan inovasi di daerah	- Belum terealisasi
2	Penguatan kerjasama internasional	- Terdapat kerjasama internasional dalam kegiatan riset dan inovasi di daerah	- Belum terealisasi

Upaya penyelarasan riset dan inovasi daerah dengan perkembangan global belum dikembangkan secara optimal. Adaptasi isu internasional tampaknya belum menjadi variabel utama dalam penentuan arah kebijakan penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Kerjasama internasional juga belum terlaksana karena berbagai kendala akses. Realisasi penyelarasan dengan perkembangan global yang belum tercapai dikarenakan oleh berbagai faktor di daerah. Pertama, kapasitas anggaran yang tidak memungkinkan untuk memperoleh kerjasama internasional. Kedua, kapasitas sumber daya manusia riset dan inovasi di perangkat daerah yang telah kelebihan beban kinerja sehingga tidak memungkinkan untuk mengembangkan jaringan kerjasama internasional. Ketiga, jaringan kerjasama dan kemitraan yang belum meluas hingga internasional. Sebenarnya, jaringan kerjasama dan kemitraan dapat dikembangkan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk menjadikan daerah Kabupaten Purworejo sebagai obyek riset dan inovasi dalam kerjasama internasional. Hal ini telah dilakukan oleh Bappedalitbang Kabupaten Purworejo salah satunya terlihat dengan keberhasilannya

menyelenggarakan kerjasama riset dengan skema Kedaireka antara Bappedalitbang Kabupaten Purworejo dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini merupakan langkah awal yang baik untuk dapat mengoptimalkan riset dan inovasi dengan sumber pendanaan eksternal. Termasuk pengembangan jaringan kerjasama kemitraan dengan dunia internasional dapat berawal dari kerjasama seperti ini.

BAB V

STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Strategi riset dan inovasi daerah didasarkan pada kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah. Maka, strategi ini sejalan dengan analisis kesenjangan ekosistem riset dan inovasi daerah pada bagian sebelumnya. Selain itu, strategi ini juga mengelaborasi kesenjangan ekosistem riset dan inovasi dengan tantangan dan peluang yang ada. Pada dasarnya, strategi ini berupaya menguatkan, membangun, dan mengembangkan kekurangan ekosistem riset dan inovasi daerah. Kabupaten Purworejo memiliki ekosistem riset dan inovasi daerah yang baik. Kekurangan yang paling besar adalah pada elemen kebijakan dan infrastruktur. Pada bagian ini, kekurangan elemen dan indikator ekosistem riset dan inovasi daerah akan dibahas untuk menjadi strategi penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah di Kabupaten Purworejo.

5.1 Strategi Pengembangan Kebijakan Dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi Di Daerah

Elemen kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi Kabupaten Purworejo memiliki beberapa kekuangan yang perlu diperbaiki dan ditambah. Terutama pada infrastruktur riset dan inovasi daerah. Akan tetapi, hal ini wajar dialami oleh pemerintah daerah lainnya. Infrastruktur riset dan inovasi membutuhkan anggaran yang besar karena berkenaan dengan pembangunan fisik. Selain itu, pengadaan dan pengembangan infrastruktur ini harus dianalisis dan disesuaikan dengan keperluannya untuk riset dan inovasi di Kabupaten Purworejo. Jika demikian, strategi pengadaan dan pengembangan infrastruktur ini tidak serta merta harus diadakan secara keseluruhan. Akan tetapi, perencanaan dan pemanfaatan sumber daya infrastruktur yang ada akan menjadi faktor utama dalam meningkatkan keberadaan infrastruktur di Kabupaten Purworejo. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur riset dan inovasi dengan tetap

melakukan efisiensi anggaran dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Purworejo.

Tabel 5.1 Strategi Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
1	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia peraturan daerah mengenai pemajuan IPTEK dan Riset Inovasi daerah - Belum tersedia rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK, riset, dan inovasi daerah terbaru 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penerbitan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah untuk memberikan kepastian hukum dan dinamika kinerja antar perangkat daerah - Penyusunan dan penerbitan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah tahun 2025-2029
2	Penataan basis data riset dan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia database hasil riset dan inovasi yang terbuka dan mudah diakses 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan database diseminasi hasil riset dan inovasi daerah - Membuka akses dan melakukan pembaharuan berkala hasil riset dan inovasi daerah
3	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia infrastruktur dasar riset meliputi laboratorium, kebun 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Purworejo Techno Park dengan menggabungkan Balai Latihan Kerja dan Pusat Layanan Usaha Terpadu

NO.	INDIKATOR	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
		raya, studio riset, dan fasilitas lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Purworejo Techno Park sebagai sarana laboratorium dasar untuk riset dan inovasi daerah - Optimalisasi Purworejo Techno Park sebagai studio riset dan/atau pusat kajian - Pengembangan kebun raya di hutan kota Kabupaten Purworejo atau taman yang telah dimiliki
4	Pengelolaan kebun raya daerah	- Belum tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah	- Menginisiasi tata kelola kebun raya Kabupaten Purworejo dengan kolaborasi bersama stakeholder terkait yang mengelola flora dan fauna khas Kabupaten Purworejo
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	- Belum tersedia laboratorium dan/atau inkubator kekayaan intelektual di daerah	- Penyediaan laboratorium dan/atau pusat hak kekayaan intelektual di daerah dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada seperti Purworejo Techno Park atau di fasilitas kelitbang yang dimiliki Bappedalitbang Kabupaten Purworejo

5.2 Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Daerah

Kapasitas kelembagaan riset dan inovasi di daerah berkaitan dengan kolaborasi penyelenggara riset dan inovasi yaitu Bappedalitbang dengan perangkat daerah di Kabupaten Purworejo. Kolaborasi ini membutuhkan peningkatan intensitas terutama pada keterlibatan dalam riset dan inovasi yang diselenggarakan oleh Bappedalitbang. Strategi ini misalnya dengan peneliti campuran (*blended researcher*) bahwa perangkat daerah dimasukkan dalam setiap proses riset dan inovasi. Hal ini memperluas perspektif dan meningkatkan kualitas riset dan inovasi yang lebih implementatif. Selain itu, peningkatan implementasi hasil riset dan inovasi Kabupaten Purworejo perlu dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah dengan melakukan evaluasi dan pengukuran hasil riset yang telah terimplementasi dan yang belum. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan perbaikan penyelenggaraan riset dan inovasi Bappedalitbang Kabupaten Purworejo kedepan.

Tabel 5.2 Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
1	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kolaborasi tata kelola riset dan inovasi daerah antara Bappedalitbang dengan pemangku kepentingan - Rendahnya tingkat pemanfaatan dan implementasi hasil riset dan inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran dan keterlibatan pemangku kepentingan riset dan inovasi - Peningkatan pemanfaatan implementasi hasil riset dan inovasi oleh perangkat daerah - Inisiasi evaluasi capaian implementasi hasil riset dan inovasi di daerah

NO.	INDIKATOR	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
			<ul style="list-style-type: none"> - Penyelarasan rencana strategis dan rencana kerja OPD dengan riset dan inovasi Kabupaten Purworejo - Pengadaan pelatihan metode riset bagi perangkat daerah
2	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	- Adanya kekurangan sarana pendukung riset dan inovasi terutama pusat studi dan teknologi informasi	- Peningkatan sarana pendukung terutama pusat studi dan teknologi informasi

5.3 Strategi Peningkatan Kemitraan Riset Dan Inovasi Daerah

Riset dan inovasi memiliki cakupan yang luas dan membutuhkan sumber daya yang besar. Maka, BRIN memberikan keleluasaan penyelenggaraan riset dan inovasi melalui berbagai institusi riset baik swasta, perguruan tinggi, maupun masyarakat yang disinergikan oleh BRIDA. Kabupaten Purworejo telah melakukan kemitraan dengan berbagai pihak antara lain lembaga riset swasta, perguruan tinggi, perangkat daerah, dan masyarakat. Intensitas kemitraan yang perlu ditingkatkan adalah dengan perguruan tinggi terutama pada mekanisme kerjasama pendanaan eksternal seperti Matching Fund Kemendikbud dan Kedaireka. Sedangkan, kemitraan juga perlu dikuatkan pada implementasi hasil riset dan inovasi

dengan tujuan meningkatkan nilai manfaat hasil riset dan inovasi daerah. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo harus lebih banyak lagi yang dilandaskan pada hasil riset dan inovasi.

Pada sisi difusi inovasi dan diseminasi hasil riset, Bappedalitbang sebagai pengelola data hasil riset dan inovasi perlu membuka akses data dan hasil riset yang telah dibuat. Ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada perangkat daerah dan masyarakat Kabupaten Purworejo menggunakan hasil riset dan inovasi untuk berbagai kepentingan. Perangkat daerah dapat mengoptimalkan dokumen tersebut untuk merencanakan kebijakan berbasis urusan. Sedangkan, masyarakat dapat mengembangkan budaya riset karena akses literatur yang cukup dari difusi inovasi dan diseminasi hasil riset yang telah dipublikasikan oleh Bappedalitbang Kabupaten Purworejo.

Tabel 5.3 Strategi Peningkatan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
1	Penguatan kemitraan antarlembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggara kerjasama antara lembaga riset daerah, OPD terkait, dan lembaga riset profesional lainnya - Kurangnya intensitas kemitraan Bappedalitbang dengan perangkat daerah terkait untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan kerjasama riset dan inovasi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi untuk meningkatkan pendanaan dan kegiatan riset dan inovasi eksternal - Peningkatan peran dan keterlibatan pemangku kepentingan riset dan inovasi

NO.	INDIKATOR	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
		pelaksanaan dan implementasi hasil riset dan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan implementasi hasil riset dan inovasi oleh perangkat daerah - Inisiasi evaluasi capaian implementasi hasil riset dan inovasi di daerah
2	Peningkatan difusi inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum merata perkembangan dan penyebaran informasi dan atensi terhadap pengembangan inovasi di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan kebutuhan inovasi di daerah - Penyebaran informasi tentang rencana inovasi prioritas di daerah
3	Peningkatan praktik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi hasil riset dan inovasi yang terbatas - Belum optimal implementasi kebijakan publik berbasis hasil riset dan inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi terbuka diseminasi hasil riset dan inovasi melalui SIDA Kabupaten Purworejo sehingga dapat diakses secara luas oleh perangkat daerah dan masyarakat - Peningkatan implementasi hasil riset dan inovasi melalui evaluasi dan monitoring penggunaan hasil riset dan inovasi oleh perangkat daerah

5.4 Strategi Peningkatan Budaya Riset Dan Inovasi Di Daerah

Budaya menjadi salah satu aspek dalam mempertahankan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Budaya masyarakat yang berkembang dan terbuka dengan ilmu pengetahuan akan memastikan ekosistem riset dan inovasi terus eksis dan berkembang di daerah. Ini juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan riset dan inovasi di daerah. Oleh karena itu, budaya riset dan inovasi di daerah perlu terus digalakkan dan Kabupaten Purworejo telah memulai budaya ini dengan baik melalui berbagai kegiatan kompetisi, riset, pameran inovasi, dan sebagainya.

Tabel 5.4 Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
1	Promosi dan kampanye inovasi	- Terselenggara promosi dan kampanye inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan masyarakat Kabupaten Purworejo	- Perluasan dan penguatan promosi dan kampanye inovasi melalui artikel media website pemerintah
2	Apresiasi prestasi inovasi	- Terselenggara kegiatan kompetisi dan apresiasi hasil inovasi Perangkat Daerah dan masyarakat	- Peningkatan apresiasi hasil inovasi dengan publikasi dan penghargaan lainnya

NO.	INDIKATOR	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
3	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Kabupaten Purworejo - Terinventarisasi data karya pengetahuan dan teknologi masyarakat - Terdapat kegiatan untuk mendorong pengembangan pengetahuan dan teknologi masyarakat - Terdapat kegiatan untuk melindungi hasil pengetahuan dan teknologi masyarakat	- Peningkatan keterbukaan akses hasil riset dan inovasi di daerah - Penguatan keterpaduan kegiatann kompetisi Kreanova dengan sasaran kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan arah kebijakan riset dan inovasi daerah - Inisiasi studio hak kekayaan intelektual dan layanan pendaftaran paten, merk, hak cipta, dan HAKI lainnya

5.5 Strategi Penguatan Keterpaduan Riset Dan Inovasi Daerah

Kegiatan riset dan inovasi yang baik adalah ketika sejalan dan selaras dengan potensi, produk unggulan, dan permasalahan di daerah. Hal ini karena riset dan inovasi bertujuan memberikan solusi yang tepat sasaran sesuai kondisi yang ada. Oleh karena itu, penguatan keterpaduan riset dan inovasi daerah di Kabupaten Purworejo perlu dilakukan guna mengoptimalkan riset dan inovasi daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

NO.	INDIKATOR	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
1	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan di daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	- Terdapat konsepsi untuk menyelaraskan kegiatan pengembangan riset dan inovasi dengan kebutuhan dan/atau permasalahan di daerah	- Penyelarasan tema dan arah riset dan inovasi dengan kegiatan riset inovasi di Bappedalitbang salah satunya kegiatan Kreanova untuk perangkat daerah dan masyarakat. Tema dan arar riset dan inovasi harus sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Purworejo
2	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	- Belum terdapat peta produk unggulan di Kabupaten Purworejo, teralisasi hanya peta potensi dan investasi. - Belum terselenggara kegiatan riset dan inovasi berbasis produk unggulan daerah	- Analisis dan pemetaan produk unggulan daerah sebagai arah kebijakan pengembangan ekonomi daerah - Inisiasi dan pengembangan riset dan inovasi dengan menindak lanjuti analisis dan peta produk unggulan daerah - Inisiasi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah

NO.	INDIKATOR	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
3	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	- Terdapat kesesuaian dan keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	- Sudah baik

Tabel 5.5 Strategi Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo

5.6 Strategi Penyelarasan Riset Dan Inovasi Daerah Dengan Perkembangan Global

Riset dan inovasi daerah butuh mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang berkembang secara global. Biasanya, riset dan inovasi di negara maju lebih dulu mengembangkan inovasi dan ilmu pengetahuan. Maka, BAPPEDALITBANG dapat memasukkan persyaratan atau aspek kebaruan inovasi dan ilmu pengetahuan dari dunia internasional ke dalam berbagai kegiatan riset dan inovasi. Hal ini berkaitan dengan kegiatan KREANOVA dan/atau riset dan inovasi yang diselenggarakan.

Tabel 5.6 Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo dengan Perkembangan Global

NO.	INDIKATOR	ANALISIS KESENJANGAN	STRATEGI
1	Peningkatan kepedulian terhadap isu internasional yang	- Adaptasi dan penyelarasan isu internasional terhadap	- Penyelarasan secara proporsional tema dan arah riset dan inovasi Kabupaten

mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	kegiatan riset dan inovasi di daerah	Purworejo dengan isu internasional - Menginfiltrasikan literatur, teori, konsep, dan inovasi internasional terbaru dalam setiap agenda riset dan inovasi di Kabupaten Purworejo
---	--------------------------------------	--

5.7 Strategi Prioritas Pengembangan Ekosistem Riset Dan Inovasi Daerah

Ekosistem riset dan inovasi di daerah Kabupaten Purworejo telah dianalisis sebagaimana penjelasan diatas. Dari 6 elemen ekosistem riset dan inovasi yang dianalisis, terdapat banyak strategi penguatan ekosistem riset dan inovasi. Sebagai langkah efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran, maka prioritas strategi pengembangan dan penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah Kabupaten Purworejo perlu disusun. Strategi prioritas ini akan menjadi peta jalan penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah Kabupaten Purworejo. Strategi prioritas penguatan dan pengembangan riset dan inovasi di daerah ini bertujuan untuk mendukung program kegiatan riset dan inovasi sehingga dapat terwujud perencanaan dan kebijakan berbasis bukti dan ilmiah.

Strategi prioritas pengembangan dan penguatan ekosistem riset dan inovasi ini juga mengemukakan adanya target pelaksanaan tahunan sehingga dapat menjadi langkah strategis Bappedalitbang Kabupaten Purworejo dalam melakukan penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Selain itu, indikator kinerja dan perangkat daerah terkait juga dikemukakan dalam rangka menciptakan sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung strategi penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi. Termasuk, target dan indikator sasaran secara eksplisit agar evaluasi dan upaya pencapaiannya dapat diukur dengan pasti dan optimal dalam implementasi.

Tabel 5.7 Matriks Rencana Penguatan dan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo

Program Prioritas	Elemen/Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun t	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Daya Saing Daerah Berkelanjutan	Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah					
	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Penyusunan dan penerbitan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Kabupaten Purworejo	Perda atau Perbub Tata Kelola Riset dan Inovasi Kabupaten Purworejo	2024-2025	Tercipta Tata Kelola Riset dan Inovasi Kabupaten Purworejo yang prima dan relevan	BAPPEDALITBANG, PEMKAB, SEKDA, DPRD
		Penyusunan dan penerbitan rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK Kabupaten Purworejo 2024-2029	Dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK Kabupaten Purworejo 2024-2029	2023	Terbit rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK Kabupaten Purworejo 2024-2026	BAPPEDALITBANG, PEMKAB, SEKDA, DPRD
	Penataan basis data riset dan inovasi	Penyediaan Database Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi	Website Database Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi	2024	Diseminasi dan Difusi Hasil Riset dan Inovasi	BAPPEDALITBANG
	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Feasibility Study Purworejo Techno Park	Dokumen Feasibility Study Purworejo Techno Park	2024-2025	Prospek Dana Pembangunan Purworejo Techno Park	
Pengadaan Purworejo Techno Park (BLK dan PLUT)		Purworejo Techno Park	2025-2026	Purworejo Techno Park		

Program Prioritas	Elemen/Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun t	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
		Pengadaan studio riset atau pusat kajian dengan Optimalisasi Purworejo Techno Park	Studio riset atau pusat kajian terpadu	2024-2025	Tata laksana tudio riset atau pusat kajian	BAPPEDALITBANG, Dinpus-Arsip
		Kerjasama penggunaan laboratorium riset dan inovasi dengan institusi riset dan perguruan tinggi yang ada di daerah dan optimalisasi Purworejo Techno Park	MoU Kerjasama penggunaan laboratorium riset dan inovasi dengan institusi riset dan perguruan tinggi yang ada di daerah	2024-2025	Optimalisasi penggunaan laboratorium riset dan inovasi di institusi riset dan perguruan tinggi di daerah	BAPPEDALITBANG
	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pengadaan studio/pusat hak kekayaan intelektual	Studio/pusat hak kekayaan intelektual	2025	Pengadaan studio hak kekayaan intelektual	BAPPEDALITBANG, Dinpus-arsip
Elemen 2: Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah						
	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Inisiasi <i>blended researcher</i> antara Bappedalitbang, perangkat daerah dan rekanan riset dan inovasi	Kerjasama Bappedalitbang dan perangkat daerah dalam riset dan inovasi	2024-2029	Sinergi Bappedalitbang dan perangkat daerah	BAPPEDALITBANG, Perangkat Daerah
		Peningkatan pemanfaatan dan implementasi hasil riset dan inovasi dengan	Kerjasama Bappedalitbang dan OPD dalam	2024-2029	Sinergi pemanfaatan dan implementasi hasil	

Program Prioritas	Elemen/Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun t	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
		penyelarasan rencana strategis OPD	pemanfaatan dan implementasi hasil riset dan inovasi		riset dan inovasi oleh Bappedalitbang dan perangkat daerah	
		Pengadaan pelatihan metode riset dan inovasi untuk perangkat daerah	Pelatihan metode riset dan inovasi	2024 - 2026	Peningkatan kemampuan dan keahlian riset dan inovasi perangkat daerah	BAPPEDALITBANG, Perangkat Daerah
Elemen 3: Peningkatan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah						
	Peningkatan praktik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Publikasi terbuka diseminasi hasil riset dan inovasi melalui database website Kabupaten Purworejo sehingga dapat diakses secara luas oleh perangkat daerah dan masyarakat	Publikasi diseminasi hasil riset dan inovasi di database website Kabupaten Purworejo	2024-2025	Publikasi diseminasi hasil riset dan inovasi daerah dan optimalisasi pemanfaatan oleh masyarakat	BAPPEDALITBANG
Elemen 4: Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah						
	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan di daerah	Penyelarasan tema dan arah riset dan inovasi dengan kegiatan riset inovasi di Bappedalitbang salah satunya kegiatan	Keterpaduan tema, sasaran, dan arah program Krenova dengan RPJMD-RPJPD dan RIPJ	2024-2025	Keterpaduan kegiatan riset dan inovasi di Kabupaten Purworejo	BAPPEDALITBANG

Program Prioritas	Elemen/Sub Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun t	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
	untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Kreanova untuk perangkat daerah dan masyarakat. Tema dan arah riset dan inovasi harus sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Purworejo	PID Kabupaten Purworejo			
	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis dan pemetaan produk unggulan daerah sebagai arah kebijakan pengembangan ekonomi daerah - Inisiasi dan pengembangan riset dan inovasi dengan menindak lanjuti analisis dan peta produk unggulan daerah - Inisiasi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah 	Dokumen peta dan potensi produk unggulan daerah Kabupaten Purworejo	2024-2025	Peta dan potensi produk unggulan daerah Kabupaten Purworejo	BAPPEDALITBANG

BAB VI

PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Keberhasilan pembangunan suatu daerah berkaitan erat dengan proses perencanaan dan kualitas kebijakan pembangunan yang keduanya harus didasarkan pada data dari riset dan inovasi sebelumnya. Maka, proses perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan yang berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Purworejo. Adapun ciri dari kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang bersifat aplikatif dan disusun berdasarkan bukti-bukti (*evidence*) yang bersifat terkini, relevan, representatif, dan valid. Kegiatan riset dan inovasi idealnya dilakukan untuk menyediakan bukti secara ilmiah terhadap permasalahan pembangunan, sehingga implementasi kebijakan lebih tepat sasaran dan sesuai target yang hendak dicapai.

Kegiatan riset dan inovasi idealnya juga linear dengan isu strategis dan sasaran utama RPJPD, RPJMD, dan Renstra OPD di Kabupaten Purworejo, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata, data yang relevan, dan mampu mendukung sistem pengambilan keputusan untuk kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan pembuktian (*science and evidence*). Selain itu, riset dan inovasi Kabupaten Purworejo mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbasis riset dan inovasi, menghasilkan riset dan inovasi yang berdampak, dan meningkatkan manfaat riset bagi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, sistem difusi inovasi dan diseminasi riset juga dikembangkan dalam rangka menyediakan bahan acuan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan perangkat daerah di Kabupaten Purworejo.








Hasil riset dan inovasi yang bertumpu pada data di masyarakat, analisis yang mendalam, dan inovasi pengembangan mendukung Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menentukan arah pembangunan daerah masa datang (*delivery mechanism*). Dalam konsep ini, masyarakat

juga dilibatkan untuk turut serta dalam proses pelaksanaan riset dan inovasi secara partisipatif sehingga budaya riset dan inovasi tetap bertahan dan berkembang di Kabupaten Purworejo. Dalam kaitan itu, Bappedalitbang Kabupaten Purworejo (sebagai pelaksana tata kelola riset dan inovasi di Kabupaten Purworejo) dapat menyediakan masukan berupa hasil riset dan inovasi yang relevan dengan sasaran utama kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo bekerjasama dengan perangkat daerah dan mitra lainnya dalam penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah. Ini bertujuan agar *evidence and knowledge-based policy* bisa dihasilkan untuk pencapaian target sasaran Pemerintah Kabupaten Purworejo.

6.1 Peta Jalan Riset Dan Inovasi Kabupaten Purworejo 2024-2029



Keterangan:

	Strategi penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah
	Klaster Riset dan Inovasi “Pertumbuhan Ekonomi Berdaya Saing”
	Klaster Riset dan Inovasi “Pembangunan Sektor Pertanian Unggulan”
	Klaster Riset dan Inovasi “Daya Saing Sumber Daya Manusia”
	Klaster Riset dan Inovasi “Tata Kelola Pemerintahan”
	<p>Baseline Riset dan Inovasi Kabupaten Purworejo Tahun Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Defisit Anggaran dan Tata Kelola Fiskal Daerah Kabupaten Purworejo 2. Daftar Produk Lokal Kabupaten Purworejo (Dinas Koperasi UKM, 2021) 3. Kajian Tata Kelola UMKM Kabupaten Purworejo Menuju Daya Saing Internasional 4. Roadmap Smart City 5. Kajian Evaluasi Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Purworejo 6. Kajian Daya Saing Sektor Pertanian dengan Pendekatan Rantai Pasok 7. Kajian Sebaran dan Faktor Penyebab Kemiskinan 8. Model Penanganan Angka Putus Sekolah 9. Model Pencegahan Stunting Kabupaten Purworejo dan Kajian Permintaan Pelayanan Kesehatan 10. Kajian Penanganan Sampah 11. Kajian Peningkatan Efisiensi Efektivitas Infrastruktur Publik Melalui Sistem Informasi Infrastruktur Layanan Publik
	Sasaran Akhir “Daya Saing Daerah Berkelanjutan”

6.2 Program Riset Dan Inovasi Kabupaten Purworejo 2024-2026

Empat sasaran utama kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo merupakan arah kebijakan riset dan inovasi. Ini bertujuan untuk optimalisasi riset dan inovasi daerah yang langsung menysasar tujuan tersebut, agar kebijakan yang disusun juga sejalan dengan hasil riset dan inovasi daerah. Keempat sasaran utama tersebut memiliki permasalahan yang berbeda sehingga jumlah riset dan inovasi yang dibutuhkan berbeda kuantitasnya. Oleh karena itu, rencana riset dan inovasi terbagi ke dalam beberapa klasifikasi berdasarkan sasaran utama pembangunan daerah Kabupaten Purworejo.

6.2.1 Klaster Riset Inovasi Pertumbuhan Ekonomi Berdaya Saing

1. Tata Kelola Keuangan dan Kebijakan Publik

- Ini merupakan kajian mendalam terhadap cara efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya keuangan publik. Penelitian ini berfokus pada tata kelola penganggaran, forecasting dan proyeksi anggaran dan realisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam eksekusi kebijakan fiskal daerah.
- Penelitian ini melibatkan analisis kebijakan publik terkait penganggaran, alokasi fiskal, pelaporan keuangan, pengawasan masyarakat, dan pemenuhan tujuan pembangunan ekonomi dan sosial.
- Ini bertujuan untuk memastikan kondusivitas dan stabilitas tata kelola fiskal daerah. Berikutnya, fiskal daerah dapat berkelanjutan dengan sehat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik dalam rangka mencapai tujuan, target, dan sasaran pemerintah daerah.

2. Rencana Induk Produk Unggulan Daerah

- Studi tentang perencanaan strategis untuk indeksasi, menentukan dan memetakan produk unggulan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Selain itu, penelitian ini juga menyusun strategi pengembangan produk unggulan unggulan yang mampu menciptakan

keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif ekonomi daerah Kabupaten Purworejo.

- Ini melibatkan identifikasi produk unggulan, analisis pasar, pengembangan infrastruktur pendukung, pengembangan sumber daya manusia, dan pembentukan jejaring kerjasama.
- Bertujuan untuk menciptakan diferensiasi dan keunggulan bersaing daerah, menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal, dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

3. Road Map Ekonomi Kreatif

- Penelitian ini merupakan identifikasi, analisis holistik, dan langkah strategis pengembangan dan pelembagaan sektor ekonomi kreatif, yang mencakup 17 sub sektor ekonomi kreatif.
- Termasuk identifikasi subsektor ekonomi kreatif, pelibatan komunitas kreatif, fasilitasi inovasi, dan pengembangan kebijakan yang mendukung.
- Ini akan mampu mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya tarik budaya serta ekonomi daerah sehingga ekonomi lebih bernilai tambah dan akseleratif.

4. Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah

- Penelitian tentang potensi sumber-sumber pendapatan lokal yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, identifikasi dan penetapan standar minimum pendapatan asli daerah yang bisa didapatkan agar memiliki target capaian yang jelas.
- Melibatkan analisis wajib dan objek pajak, mekanisme pajak dan retribusi daerah, investasi, dan kerjasama sektor swasta.
- Penelitian ini bertujuan menciptakan diversifikasi pendapatan daerah, meningkatkan kapasitas keuangan keuangan, dan meminimalkan ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat.

5. Master Plan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

- Dokumen ini merupakan rencana induk pengembangan kawasan strategis pariwisata. Analisis ini memetakan daya dukung lahan, lingkungan alam, ketersediaan infrastruktur layanan umum, aktivitas ekonomi dan sosial, dan potensi pengembangan objek wisata. Selain itu juga menyangkut

mencakup infrastruktur, pemasaran, pelestarian budaya, dan pengelolaan lingkungan.

- Terutama mengidentifikasi daya tarik wisata, pengembangan kawasan inti/penyangga/pendukung/pelayanan, fasilitas, pengelolaan risiko, dan partisipasi masyarakat.
- Bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan menjadi katalisator ekonomi daerah yang dapat menarik sektor lainnya melalui sektor pariwisata sebagai lokomotif, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mempromosikan budaya lokal.

6. Tata Kelola Keuangan Publik Berkelanjutan

- Penelitian tentang strategi dan konsep implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan publik, menjaga stabilitas, mengendalikan anggaran dan realisasi belanja, dan capaian *output* dan *outcome* yang terukur.
- Ini melibatkan perumusan standar anggaran dan alokasi, sistem penganggaran dana untuk kebijakan berkelanjutan, dan pengendalian melalui mekanisme tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik.
- Bertujuan untuk menciptakan fiskal yang sehat, stabil, berkelanjutan, dan meminimalkan risiko-risiko fiskal terhadap pembangunan dan layanan masyarakat.

7. Inovasi Produk Unggulan Tahap I

- Penelitian ini tentang pengembangan inovasi dalam produk-produk tertentu yang diidentifikasi sebagai produk unggulan daerah.
- Melibatkan riset dan pengembangan teknologi tepat, penggunaan teknologi baru, dan strategi pemasaran inovatif.
- Meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan global, menciptakan stimulus pertumbuhan ekonomi secara agregat, dan menciptakan lapangan kerja.

8. Inovasi Produk Ekonomi Kreatif Tahap I

- Penelitian tentang inovasi dan teknologi tepat guna dalam mengembangkan produk dan layanan pada 17 subsektor ekonomi kreatif dengan produksi yang lebih efisien karena dukungan inovasi dan teknologi.

- Termasuk identifikasi tren kreatif, kolaborasi antarindustri, dan pengembangan ekosistem inovasi.
 - Ini bertujuan untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja dalam sektor ekonomi kreatif.
9. Rencana Induk Tata Kelola Pasar
- Penelitian mengenai perencanaan dan implementasi tata kelola pasar yang efektif, mencakup peran pemerintah, regulasi, infrastruktur, dan partisipasi sektor swasta dalam menciptakan pasar yang adil, efisien, dan berdaya saing.
 - Melibatkan analisis regulasi pasar, transparansi, perlindungan konsumen, serta inovasi dalam sistem tata kelola.
 - Meningkatkan daya saing pasar lokal, melibatkan sektor swasta dalam pertumbuhan ekonomi, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen.
10. Prospektus Investasi Kawasan Strategis Pariwisata Daerah
- Penelitian ini merupakan analisis mengenai penyusunan dokumen prospektus investasi untuk menarik investor ke kawasan strategis pariwisata daerah, dengan fokus pada potensi keuntungan, risiko, dan manfaat investasi.
 - Melibatkan analisis keuangan, peluang investasi, dampak sosial dan lingkungan, serta regulasi investasi.
 - Mendukung pengembangan pariwisata lokal melalui investasi, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah.
11. Pengembangan Pembiayaan Publik dan Potensi PAD
- Studi mengenai diversifikasi dan optimalisasi sumber pendapatan daerah, termasuk potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Diversifikasi pembiayaan meliputi investasi sisa anggaran, penambahan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, dan mekanisme pembiayaan fiskal lainnya.
 - Melibatkan analisis potensi PAD, manajemen utang, dan strategi pembiayaan inovatif.

- Mencapai kemandirian keuangan daerah, meminimalkan risiko keuangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

12. Inovasi Produk Unggulan Tahap II

- Penelitian lebih lanjut terkait pengembangan inovasi dalam produk-produk tertentu yang diidentifikasi sebagai produk unggulan dan, dengan fokus pada peningkatan produktivitas, kualitas, efisiensi, dan pemasaran. Selain pengembangan inovasi dan teknologi lanjutan, riset ini juga dapat berupa penciptaan inovasi dan teknologi pada komoditas produk unggulan lainnya selain produk unggulan pada tahap I.
- Termasuk riset dan pengembangan inovasi dan teknologi produksi, pemasaran inovatif, digitalisasi bisnis, dan adaptasi terhadap tren pasar.
- Memperkuat posisi produk unggulan daerah di pasar global, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan daya saing produk.

13. Inovasi Produk Ekonomi Kreatif Tahap II

- Penelitian mendalam tentang inovasi dalam produk dan layanan 17 subsektor ekonomi kreatif, dengan fokus pada penerapan inovasi dan teknologi produksi, digitalisasi bisnis, dan kreativitas masyarakat.
- Ini meliputi inovasi teknologi produksi, pengembangan ekosistem inovasi, pengembangan kreativitas sumber daya manusia, komersialisasi budaya lokal, peningkatan nilai tambah produk kreatif, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.
- Bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, mendukung pelaku industri kreatif, dan menciptakan lapangan kerja berbasis kreativitas.

14. Restrukturisasi Tata Kelola Pasar

- Penelitian tentang restrukturisasi tata kelola pasar ini merupakan tahap akhir dari riset tata kelola pasar. Ini mengenai evaluasi struktur tata kelola, perumusan tata kelola terbaik, perumusan strategi pengelolaan pasar yang lebih adaptif, responsif, dan akseleratif. Hal ini dimisalkan sebagian pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Purworejo dijadikan BUMD sehingga memiliki mekanisme kinerja yang lebih profesional.

- Analisis ini meliputi tata kelola, penataan ruang, perilaku ekonomi pedagang, ergonomi pengunjung, potensi ekonomi sosial, dan risiko-risiko berbasis sosial masyarakat. Dengan demikian, kebijakan restrukturisasi pasar bisa dijalankan dengan holistik dan tepat sasaran.
- Meningkatkan daya saing pasar, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan.

15. Road Map Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata

- Penelitian mengenai perencanaan dan roadmap untuk pengembangan kawasan strategis pariwisata, mencakup tahapan pengembangan, prioritas infrastruktur, dan upaya pemasaran.
- Melibatkan analisis potensi pariwisata, ketersediaan infrastruktur, serta faktor-faktor pendorong dan penghambat.
- Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, meningkatkan daya tarik wisata, dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal. Selain itu, ini juga mengoptimalkan investasi yang telah ada sehingga memperluas dan menambah dampak ekonomi bagi masyarakat

6.2.2 Kluster Riset dan Inovasi: Pembangunan Pertanian Unggulan

1. Rencana Induk dan Pemetaan Pertanian Strategis

- Penelitian yang mengeksplorasi penyusunan rencana induk dan pemetaan komoditas strategis sektor pertanian, dengan fokus pada identifikasi potensi komoditas/varietas, alokasi sumber daya, daya dukung lingkungan alam, potensi ekonomi sosial, dan strategi pengembangan pertanian berkelanjutan.
- Melibatkan analisis kondisi lahan, relevansi komoditas/varietas, kelayakan sosial ekonomi, keberlanjutan lingkungan, perencanaan teknologi, dan kebutuhan infrastruktur.
- Mendorong pembangunan sektor pertanian yang relevan dengan potensi daerah. Selain itu, juga berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan memastikan ketahanan pangan daerah.

2. Peta Jalan Pengembangan Agribisnis dan Hilirisasi Pertanian
 - Penelitian yang merinci langkah-langkah dan strategi pengembangan agribisnis dan hilirisasi pertanian, mulai dari input pertanian, produksi, pasca panen, produk turunan bernilai tambah, hingga pemasaran produk pertanian.
 - Melibatkan perencanaan rantai pasok agribisnis, perencanaan rantai nilai produksi, peningkatan nilai tambah produk, dan integrasi teknologi dalam proses produksi dan pemasaran serta distribusi.
 - Mengoptimalkan potensi ekonomi sektor pertanian bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan keberlanjutan agribisnis.
3. Inovasi Teknologi Pertanian Tepat Guna tahap I
 - Penelitian pada tahap awal inovasi teknologi pertanian yang tepat guna, dengan fokus pada pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.
 - Melibatkan identifikasi teknologi tepat guna, uji coba lapangan, dan penilaian dampak sosial serta ekonomi.
 - Meningkatkan daya saing pertanian, mempercepat adopsi teknologi, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
4. Inovasi Komoditas Pertanian Strategis
 - Penelitian yang mengeksplorasi inovasi pada komoditas pertanian strategis dengan tujuan meningkatkan nilai tambah, kualitas, jumlah produksi, dan daya saing produk.
 - Melibatkan riset dan pengembangan varietas tanaman, peningkatan metode budidaya, dan pengembangan produk turunan.
 - Mendiversifikasi ekonomi pertanian, menciptakan nilai tambah produk, dan mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu.
5. Inovasi Teknologi Pertanian Tepat Guna tahap II
 - Penelitian lanjutan pada tahap kedua inovasi teknologi pertanian, yang fokus pada penerapan dan adaptasi teknologi yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya. Atau teknologi dan inovasi tepat guna lainnya untuk mendukung produktivitas sektor pertanian.

- Melibatkan skala penggunaan teknologi, pengukuran dampak, dan perbaikan berkelanjutan.
- Menyebarluaskan teknologi pertanian inovatif, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan efisiensi produksi.

6.2.3 Kluster Riset dan Inovasi: Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Peta Jalan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan PPKS

- Penelitian yang merinci langkah-langkah strategis dalam jangka panjang sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan terutama pada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Kabupaten Purworejo.
- Penelitian ini meliputi analisis kluster jenis-jenis kemiskinan, perumusan kebijakan sosial yang relevan dan holistik, pendekatan partisipatif masyarakat, dan evaluasi dampak program penanggulangan kemiskinan.
- Bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan inklusivitas dalam pembangunan.

2. Kajian Percepatan Capaian Indeks Pendidikan

- Penelitian yang mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempercepat pencapaian indikator-indikator pendidikan, terutama rata-rata lama sekolah, angka putus sekolah, dan angka partisipasi kasar/murni.
- Melibatkan analisis sosial, analisis kurikulum, infrastruktur pendidikan, dan penerapan teknologi dalam pembelajaran.
- Meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses pendidikan, mengurangi kesenjangan pendidikan, dan menciptakan generasi yang lebih terampil dan berpengetahuan.

3. Kajian Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

- Penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan dengan menganalisis aspek-aspek seperti aksesibilitas, kualitas, ketanggapan, responsibilitas, dan efektivitas program kesehatan.
- Melibatkan evaluasi fasilitas kesehatan, tata kelola layanan kesehatan, tenaga kesehatan, sistem informasi kesehatan, dan persepsi kepuasan masyarakat.

- Bertujuan untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan keterjangkauan layanan kesehatan masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan. Salah satu sasaran utamanya adalah penurunan prevalensi stunting dan pencegahan dini risiko stunting di masyarakat.
4. Inovasi Sosial Pengelolaan Sampah
- Penelitian yang mengeksplorasi inovasi sosial dalam pengelolaan sampah, melibatkan pendekatan partisipatif masyarakat, pemilahan sampah, dan penerapan teknologi hijau.
 - Termasuk analisis sikap masyarakat, efektivitas program, dan pengaruh inovasi pada lingkungan.
 - Mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, mendorong kesadaran masyarakat, dan menciptakan pola konsumsi yang berkelanjutan.
5. Road Map Pemberdayaan Klaster Kemiskinan dan PPKS Daerah
- Penelitian yang mengembangkan peta jalan untuk pemberdayaan klaster kemiskinan dan penanggulangan masalah sosial di tingkat daerah, melibatkan koordinasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.
 - Termasuk identifikasi klaster kemiskinan, model pemberdayaan yang relevan dengan setiap jenis klaster kemiskinan, alokasi sumber daya dan keuangan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.
 - Meningkatkan efektivitas program pemberdayaan, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, dan memberikan solusi berbasis komunitas.
6. Peta Jalan Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Berbasis Teknologi
- Penelitian yang merinci langkah-langkah menuju peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan teknologi, termasuk infrastruktur digital dan inovasi pembelajaran berbasis teknologi.
 - Melibatkan analisis akses teknologi, pelatihan guru, dan integrasi teknologi dalam kurikulum.
 - Meningkatkan kesetaraan akses pendidikan, memanfaatkan potensi teknologi, dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

7. Inovasi Teknologi Digital Bidang Kesehatan
 - Penelitian yang mengeksplorasi penerapan teknologi digital dalam bidang kesehatan, mencakup telemedicine, manajemen data kesehatan, dan pengembangan aplikasi kesehatan.
 - Melibatkan evaluasi keefektifan teknologi, privasi data, dan penerimaan masyarakat terhadap inovasi.
 - Meningkatkan akses layanan kesehatan, mempercepat diagnosis, dan meningkatkan efisiensi sistem kesehatan.

8. Inovasi Teknologi Pengelolaan Sampah Berbasis Massa
 - Penelitian yang memfokuskan pada pengembangan inovasi teknologi untuk pengelolaan sampah dalam skala besar, termasuk daur ulang, penggunaan energi terbarukan, dan pemrosesan sampah organik.
 - Melibatkan analisis teknologi yang ramah lingkungan, biaya implementasi, dan integrasi dalam kebijakan daur ulang. Inovasi dan teknologi yang dirancang terutama untuk mengolah sampah organik yang tidak bisa diolah oleh rumah tangga. Pembagian pengelolaan yaitu sampah organik oleh rumah tangga dan sampah anorganik oleh pemerintah atau organisasi pemerintah yang dibentuk.
 - Mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

9. Pengembangan Kualitas Puskesmas
 - Penelitian yang mengevaluasi dan merencanakan upaya pengembangan kualitas Puskesmas, mencakup penguatan tenaga kesehatan, infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
 - Termasuk analisis kebutuhan lokal, pelibatan masyarakat, dan implementasi teknologi dalam pelayanan kesehatan dasar.
 - Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan, dan menciptakan kondisi kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

10. Teknologi Tata Kelola Sampah Berbasis Industri

- Penelitian yang mengembangkan tata kelola sampah yang telah distimulus oleh inovasi teknologi menjadi skala industri yang lebih besar. Ini termasuk tata kelola sampah, sistem manajemen limbah, teknologi pengolahan, dan pendekatan berkelanjutan hingga pemasaran dan penjualan hasil pengolahan sampah.
- Melibatkan analisis tata kelola, efisiensi teknologi, dampak lingkungan, dan integrasi dengan sistem industri serta pemasaran produk pengolahan sampah.
- Mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah, dan menciptakan model tata kelola sampah yang efektif.

6.2.4 Klaster Riset dan Inovasi: Tata Kelola Pemerintahan

1. Analisis Indeks Reformasi Birokrasi

- Penelitian yang menganalisis indikator dan metode untuk mengukur efektivitas dan kemajuan reformasi birokrasi, termasuk perbaikan proses administratif, kebijakan, dan kualitas layanan publik.
- Termasuk penilaian kebijakan reformasi, partisipasi masyarakat, dan dampak pada pelayanan publik.
- Meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan publik, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

2. Analisis Indeks Profesionalitas ASN

- Penelitian yang mengukur dan menganalisis indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan fokus pada kualifikasi, etika, dan peningkatan kapasitas.
- Termasuk evaluasi kebijakan pengembangan ASN, partisipasi dalam pelatihan, dan implementasi kode etik.
- Meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN, mengoptimalkan pelayanan publik, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif.

3. Analisis Pengembangan Sistem Reformasi Birokrasi
 - Penelitian yang menganalisis perkembangan dan efektivitas sistem dalam mendukung reformasi birokrasi, mencakup infrastruktur teknologi informasi, kebijakan, dan strategi pengembangan SDM.
 - Melibatkan evaluasi implementasi sistem, kesiapan teknologi, dan dampak pada kinerja birokrasi.
 - Meningkatkan efisiensi birokrasi, memfasilitasi reformasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang adaptif.

6.3 Program, Rencana Aksi, Dan Target Riset Dan Inovasi Kabupaten Purworejo Tahun 2024-2029

Klaster Riset dan Inovasi	Baseline	Program Kegiatan	Tahun Pelaksanaan			Indikator dan Sasaran Akhir	OPD Terkait
			2024 - 2025	2026 - 2027	2028 - 2029		
Pertumbuhan Ekonomi Berdaya Saing	Defisit Anggaran dan Tata Kelola Fiskal Daerah Kabupaten Purworejo	Tata Kelola Keuangan dan Kebijakan Publik	√			Fiskal Terukur dan Berimbang	BPKPAD, Bappedalitbang, Setda, Setwan
	Daftar Produk Lokal Kabupaten Purworejo	Rencana Induk Produk Unggulan Daerah	√			Peta Potensi dan Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Dinkop-UKM-Dag, Dinperintransnaker, DKPP
	Kajian Tata Kelola UMKM Kabupaten Purworejo Menuju Daya Saing Internasional	Road Map Ekonomi Kreatif	√			Potensi dan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dinporapar, Dinkop-UKM-Dag, Dinperintransnaker
	Roadmap Smart City	Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah	√			Peta Klaster Potensi dan Standar Pendapatan Asli Daerah	BPKPAD, Bappedalitbang, Setda, Setwan
	Kajian Evaluasi Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Purworejo	Master Plan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	√			Peta dan Strategi Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	Dinporapar, DPPPAPMD, Dinkop-UKM-Dag, Dinperintransnaker, DKPP
	Tata Kelola Keuangan dan Kebijakan Publik	Tata Kelola Keuangan Publik Berkelanjutan		√		Indeks Kemandirian Keuangan = 0,25	BPKPAD, Bappedalitbang, Setda, Setwan

Klaster Riset dan Inovasi	Baseline	Program Kegiatan	Tahun Pelaksanaan			Indikator dan Sasaran Akhir	OPD Terkait
			2024 - 2025	2026 - 2027	2028 - 2029		
						Indeks Fleksibilitas Keuangan = 0,50	
	Rencana Induk Produk Unggulan Daerah	Inovasi Produk Unggulan I		√		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Manufaktur 10%	Dinkop-UKM-Dag, Dinperintransnaker, DKPP
	Road Map Ekonomi Kreatif	Inovasi Produk Ekonomi Kreatif I		√		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Manufaktur 10%	Dinporapar, Dinkop-UKM-Dag, Dinperintransnaker
	Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Rencana Induk Tata Kelola Pasar		√		Strategi Tata Kelola Pasar Peningkatan Retribusi Pasar 20%	Dinkop-UKM-Dag, BPKPAD, Bappedalitbang, Setda, Setwan
	Master Plan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	Prospektus Investasi Kawasan Strategis Pariwisata Daerah		√		Peningkatan Investasi 20% di Kawasan Strategis Pariwisata	Dinporapar, DPMPTSP, DPPPAPMD, Dinkop-UKM-Dag, Dinperintransnaker, DKPP
	Tata Kelola Keuangan Publik Berkelanjutan	Pengembangan Pembiayaan Publik dan Potensi PAD			√	Indeks Kemandirian Keuangan = 0,35 Indeks Fleksibilitas Keuangan = 0,60	BPKPAD, Bappedalitbang, Setda, Setwan

Klaster Riset dan Inovasi	Baseline	Program Kegiatan	Tahun Pelaksanaan			Indikator dan Sasaran Akhir	OPD Terkait
			2024 - 2025	2026 - 2027	2028 - 2029		
	Inovasi Produk Unggulan I	Inovasi Produk Unggulan II			√	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Manufaktur 10%	Dinkop-UKM-Dag, Dinperintransnaker, DKPP
	Inovasi Produk Ekonomi Kreatif I	Inovasi Produk Ekonomi Kreatif II			√	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Manufaktur 10%	Dinporapar, Dinkop-UKM-Dag, Dinperintransnaker
	Rencana Induk Tata Kelola Pasar	Restrukturisasi Tata Kelola Pasar			√	Perbaikan Profesionalitas Tata Kelola Pasar Peningkatan Retribusi Pasar 40%	Dinkop-UKM-Dag, BPKPAD, Bappedalitbang, Setda, Setwan
	Prospektus Investasi Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	Road Map Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata			√	Peningkatan Investasi 50% di Kawasan Strategis Pariwisata	Dinporapar, DPMPSTSP, DPPPAPMD, Dinkop-UKM-Dag, Dinperintransnaker, DKPP
Pembangunan Pertanian Unggulan	Kajian Daya Saing Sektor Pertanian dengan Pendekatan Rantai Pasok	Rencana Induk dan Pemetaan Pertanian Strategis	√			Peta Potensi dan Strategi Pengembangan Pertanian Strategis	DKPP, Dinkop-UKM-Dag, DPPPAPMD

Klaster Riset dan Inovasi	Baseline	Program Kegiatan	Tahun Pelaksanaan			Indikator dan Sasaran Akhir	OPD Terkait
			2024 - 2025	2026 - 2027	2028 - 2029		
	Rencana Induk dan Pemetaan Pertanian Strategis	Peta Jalan Pengembangan Agribisnis dan Hilirisasi Pertanian		√		Indeks Nilai Tukar Petani 115 <i>Margin of Farm</i> 20%	DKPP, Dinkop-UKM-Dag, DPPPAPMD
	Rencana Induk dan Pemetaan Pertanian Strategis	Inovasi Teknologi Pertanian Tepat Guna I		√		Peningkatan Produktivitas Pertanian 20%	DKPP, Dinkop-UKM-Dag, DPPPAPMD
	Peta Jalan Pengembangan Agribisnis dan Hilirisasi Pertanian	Inovasi Komoditas Pertanian Strategis			√	Indeks Nilai Tukar Petani 125 <i>Margin of Farm</i> 30%	DKPP, Dinkop-UKM-Dag, DPPPAPMD
	Inovasi Teknologi Pertanian Tepat Guna I	Inovasi Teknologi Pertanian Tepat Guna II			√	Peningkatan Produktivitas Pertanian 40%	DKPP, Dinkop-UKM-Dag, DPPPAPMD
Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kajian Sebaran dan Faktor Penyebab Kemiskinan	Peta Jalan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan PPKS	√			Peta Risiko Kemiskinan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Angka Kemiskinan 10%	Dinas Sosial, DPPPAPMD
	Model Penanganan Angka Putus Sekolah	Kajian Percepatan Capaian Indeks Pendidikan	√			Rata-Rata Lama Sekolah 8,60 Angka Partisipasi Murni SMP 80%	Dindikbud

Klaster Riset dan Inovasi	Baseline	Program Kegiatan	Tahun Pelaksanaan			Indikator dan Sasaran Akhir	OPD Terkait
			2024 - 2025	2026 - 2027	2028 - 2029		
	Model Pencegahan Stunting Kabupaten Purworejo dan Kajian Permintaan Pelayanan Kesehatan	Kajian Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	√			Angka Stunting 20% Angka Harapan Hidup 75,00	Dinkes, DPPAPMD
	Kajian Penanganan Sampah	Inovasi Sosial Pengelolaan Sampah	√			Penurunan Residu Sampah 20%	DLH, DPPAPMD
	Peta Jalan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan PPKS	Road Map Pemberdayaan Klaster Kemiskinan dan PPKS Daerah		√		Angka Kemiskinan 7,5%	Dinas Sosial, DPPAPMD
	Kajian Percepatan Capaian Indeks Pendidikan	Peta Jalan Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Berbasis Teknologi		√		Rata-Rata Lama Sekolah 9,0 Angka Partisipasi Murni SMP 80%	Dindikbud, Dinkominstaper
	Kajian Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Inovasi Teknologi Digital Bidang Kesehatan		√		Angka Stunting 16% Angka Harapan Hidup 77,00	Dinkes, Dinkominstaper, DPPAPMD
	Inovasi Sosial Pengelolaan Sampah	Inovasi Teknologi Pengelolaan Sampah Berbasis Massa		√		Penurunan Residu Sampah 50%	DLH, DPUPR, DPPAPMD
	Inovasi Teknologi Digital Bidang Kesehatan	Pengembangan Kualitas Puskesmas			√	Angka Stunting 12% Angka Harapan Hidup 79,00	Dinkes, Dinkominstaper, DPPAPMD

Klaster Riset dan Inovasi	Baseline	Program Kegiatan	Tahun Pelaksanaan			Indikator dan Sasaran Akhir	OPD Terkait
			2024 - 2025	2026 - 2027	2028 - 2029		
	Inovasi Teknologi Pengelolaan Sampah Berbasis Massa	Teknologi Tata Kelola Sampah Berbasis Industri			√	Penurunan Residu Sampah 70%	DLH, DPUPR, DPPAPMD
Tata Kelola Pemerintahan	Kajian Peningkatan Efisiensi Efektivitas Infrastruktur Publik Melalui Sistem Informasi Infrastruktur Layanan Publik	Analisis Indeks Reformasi Birokrasi	√			Indeks Reformasi Birokrasi 67	BKPSDM, Setda, Bappedalitbang
	Analisis Indeks Reformasi Birokrasi	Analisis Indeks Profesionalitas ASN		√		Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN 30%	BKPSDM, Setda, Bappedalitbang
	Analisis Indeks Profesionalitas ASN	Analisis Pengembangan Sistem Reformasi Birokrasi			√	Indeks Reformasi Birokrasi 73	BKPSDM, Setda, Bappedalitbang

REFERENSI

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2019). Introduction to modern economic growth. Princeton University Press.
- Barlow, J., Roehrich, J. K., & Wright, S. (2018). Europe sees mixed results from public-private partnerships for building and managing health care facilities and services. *Health Affairs*, 37(2), 192-198.
- BPS Kabupaten Purworejo. (2023). *Kabupaten Purworejo Dalam Angka*. Purworejo: BPS Kabupaten Purworejo.
- BPS Kabupaten Purworejo. (2023). *Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Purworejo*. Purworejo: BPS Kabupaten Purworejo.
- Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2021). Tourism and water: Interactions and impacts. Channel View Publications.
- International Monetary Fund (IMF). (2021). World Economic Outlook, April 2021: Managing Divergent Recoveries. Washington, DC: IMF.
- Khan, A. H. (2019). Agriculture and rural development in a globalizing world: Challenges and opportunities. Routledge.
- McCann, P. (2019). Urban and regional economics. Oxford University Press.
- UNWTO (World Tourism Organization). (2019). Tourism Towards 2030/Global Overview. UNWTO.
- World Bank. (2020). Global Economic Prospects, June 2020. Washington, DC: World Bank.